



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

TAHUN 2024



#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2024 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 13 Januari 2025

Pjt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



Kamdani

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran, Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
1. Capaian Kinerja	11
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	14
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	24
IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	35
IK4. Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	46
IK5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	56
IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	60
IK7. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	67
IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	79
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
IK10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	94

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK11.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	103
IK12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	109
IK13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	113
IK14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	122
IV. PENUTUP		
1.	Kesimpulan	132
2.	Rekomendasi	132
3.	Tindak lanjut	133

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2. Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	1
IK2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	9
IK3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	17
IK4.	Rasio Eksport iakn dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	28
IK5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	35
IK6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	38
IK7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	47
IK8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	55
IK9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	59
IK10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	63
IK11.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	68
IK12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	74
IK13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	77
IK14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	69

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024 adalah sebesar 110,66 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS.) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 14 (empat belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024 ada 3 Indikator Kinerja yang baru yaitu : 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
- B. Uraian Indikator Kinerja Utama yang capainnya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 70 % terealisasi 98,10 %;
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 70 % terealisasi 114,2 %;

3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar target 70 % teralisasi 100 %;
4. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 99 % realisasi 100 %;
5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar, target 70 % terealisasi 83,10 %;
6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 3.36 Indeks terealisasi 3,77 Indeks;
7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 86 terealisasi 90.78 Nilai Indeks;
8. Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 82 Nilai Indeks terealisasi 83.80 Nilai Indeks;
9. Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 71 Nilai terealisasi 98,37 Nilai;
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 93,76 nilai terealisasi 97,16 nilai;
11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 100 % teralisasi 100 %;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 80 % terealisasi 100 %.
13. Nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 80 % terealisasi 84,34%
14. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, target 80 % teralisasi 97,50 %;

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 sebesar:
Rp 13.130.993 dan realisasi 12.893.528 atau 98,19%

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3 Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung kegiatan nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar.
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar yang didukung kegiatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar, Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “ Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong ”.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Aspek yang berkaitan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BPPMHKP

Oleh karena itu, BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu :

VISI

Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

MISI

1

Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

2

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

3

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan Tata kelola pemerintahan di KKP

2. Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 maka sasaran strategis (55) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPPMHKP |

3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

BPPMHKP telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.44/BKIPM/2020. Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BPPMHKP pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk Tahunan 2024 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahunan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2023-2024					Tahun 2024				
		2023	2023	2023	2023	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024
Peningkatan pengendalian mutu dan jaminan mutu pelayanan sistem proteksi dan tenaga kerja	1. Peningkatan hasil budaya kerja pelayanan sesuai prosedur kerja yang memenuhi standar mutu dan keamanan dengan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	10	10	100	100,00	100,00
	2. Peningkatan hasil budaya kerja pelayanan sesuai prosedur kerja yang memenuhi standar mutu dan keamanan dengan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	10	10	100	100,00	100,00
	3. Peningkatan pengendalian mutu hasil pelayanan di wilayah UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	10	6	6	10	10	100	100,00	100,00
	4. Hasil Suplai dan hasil pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan dengan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	25,00	35,00	100,00	30	30	300	100,00	100,00

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2023-2025					Tahun 2026				
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028
Terselenggaranya kegiatan dan program kerja Balai Besar KIPM Makassar sesuai Perencanaan dan Anggaran	5. Nilai Perolehan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	70	70	80.1	100.7	100.7
Terselenggaranya kegiatan dan program kerja Balai Besar KIPM Makassar sesuai Perencanaan dan Anggaran	6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	89.6	92.0	94	93.8	97.7	100.0	100.0
	7. Indeks Perforansi KIPM Makassar	-	80.0	80.0	80.0	80.0	80	80	80.0	100.0	100.0
	8. Nilai Perolehan Voucher SPP Balai Besar KIPM Makassar	-	80.0	80	80.1	80.0	80	80	80.0	100.0	100.0
	9. Nilai Perolehan Penghasilan Pegawai Balai Besar KIPM Makassar	-	-	80	80.0	80.1	70	70	80.0	100.0	100.0
	10. Nilai realisasi pelaksanaan program KIPM Makassar	-	80	80	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	100.0	100.0
	11. Pemenuhan persentase anggaran KIPM Makassar	-	-	-	-	80	80	80	80	100.0	100.0
	12. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar	-	80	80	80	80	80	80	80	100.0	100.0
	13. Target kegiatan pengabdian masyarakat Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	75.0	80.0	80	80	80.0	100.0	100.0
	14. Target kegiatan SWM Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	80	80.0	80	80	80.0	100.0	100.0

2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 4 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 70 %
4. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 99 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK. 1. Persentase hasil kelautandan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Isian Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2023 - 2023					Tahun 2024					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2023-2024	
		2023	2023	2023	2023	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Rencana
Peningkatan pengendalian dan pengkajian mutu hasil kelautandan perikanan	1. Persentase hasil kelautandan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	-	70	70	110	157,14	178,57	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BBPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BBPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BBPMHKP

berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
- c. Sertifikasi Cara Budi-Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
- e. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB);
- f. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Tahun 2024 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPI Beba Takalar pada 7 unit kapal perikanan, PPI Paotere Makassar pada 1 unit kapal perikanan, PP Untia pada 1 unit kapal perikanan dan TPI Lappa Sinjai dengan 4 kapal. Dengan total 13 kapal yang diinspeksi.

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros di Kabupaten Maros. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur mutu BPPMHKP Makassar bersama auditor CPIB dari BPBAP Takalar dan DKP Provinsi Sul -Sel. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembenihan ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03226) dengan komoditas Ikan Nila.

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1 lokasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros di Kabupaten Maros. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Makassar Bersama auditor CBIB dari BPBAP Takalar dan DKP Provinsi Sulsel. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03221) dengan komoditas ikan nila.

Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPQIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPQIB

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\% = \frac{1+1+13}{12} \times 100\% = 125\%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- 13 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 9 sertifikat telah terbit pada bulan Desember 2024, sedangkan sebanyak 4 sertifikat masih dalam proses penerbitan di Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.
- 1 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan November 2024
- 1 Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan Desember 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 133,511,000 yang digunakan untuk :

1. Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 57.401.000
2. Bimtek/Sosialisasi sertifikasi produksi primer Rp. 76.110.000

Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 132.135.925 atau 98.97 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	57.401.000	56.330.500	1.070.500
2	Bimtek/Sosialisasi sertifikasi produksi primer	76.110.000	75.805.425	304.575
JUMLAH		133.511.000	132.135.925	1.375.075

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada tahun 2024 sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 Inspektur Mutu, 2 PJLP dari BPPMHKP Makassar yang didukung oleh Perwakilan 4 orang PP Untia serta 1 penyuluh swadaya. Sedangkan untuk kegiatan CPIB dan CBIB telah dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros dengan melibatkan 3 inspektur mutu dan 1 orang fungsional umum dari BPPMHKP Makassar dan 2 orang auditor CBIB dan 2 orang auditor CPIB dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan BPBAP Takalar.

Akar Masalah

Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 1 – 4 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Oria Hotel Jakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPSDMKP.
2. Pada tanggal 15 – 16 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Refreshment Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu pada kegiatan sertifikasi produksi primer bidang perikanan budidaya di Santika Premiere Hotel Belitung yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP.
3. Pada tanggal 17 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Refreshment Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu pada kegiatan sertifikasi bidang perikanan tangkap serta penanganan distribusi dan pengolahan di Santika Premiere Hotel Belitung yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP.
4. Pada tanggal 21 – 27 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti workshop Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bidang Produksi Primer di Lombok Astoria Hotel Mataram NTB yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
5. Pada tanggal 04 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit

pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan;

6. Pada tanggal 5 – 8 November 2024, Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti workshop Sertifikasi SJMKHP bidang CPIB Kapal di Luwansa Hotel and Convention Center Manado Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
7. Pada tanggal 18 November 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal Perikanan yang dilaksanakan di kantor Pelabuhan Perikanan Untia yang dihadiri oleh 20 orang awak kapal dari hasil kegiatan tersebut semua awak kapal yang hadir mendapatkan sertifikat Bimtek CPIB.
8. Pada Tanggal 19 November 2024 BPPMHKP Makassar mengikuti kegiatan operasi terpadu dokumen perizinan kapal perikanan berkolaborasi dengan pelabuhan perikanan UNTIA, PSDKP Satwas Makassar, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi pemilik kapal perikanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap perijinan berusaha, meningkatkan pemahaman terhadap cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal serta pemenuhan buku Kesehatan kapal.
9. Pada tanggal 18 Desember 2024 Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal Perikanan yang dilaksanakan di TPI Lappa Sinjai yang dihadiri oleh 55 orang awak kapal. dari hasil kegiatan tersebut semua awak kapal yang hadir mendapatkan sertifikat Bimtek CPIB.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan PP Untia DIPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis

I. Daftar Sertifikasi CPIB Kapal di Tahun 2024

No.	Nama Kapal Perikanan	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1	KM. Sinar Madina AN	Kakap, jengah, kurisi	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240004, Tanggal 02 Desember 2024
2	KM. Akbar Jaya 3	Kakap, kurisi	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240005, Tanggal 02 Desember 2024
3	KM. Magfirah 07	Tongkol, layang	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240003, Tanggal 02 Desember 2024
4	KM. Tasniyah Jaya	Kakap merah, lamuru, katamba, kerapu, kaneka, ekor kuning	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240014, Tanggal 05 Desember 2024
5	KM. Iksaryadi Jaya	Kerapu, katambak, lamuru, kakap merah, ekor kuning	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240015, Tanggal 05 Desember 2024
6	KM. Minasa Makka FR	Kerapu, Kakap, Katambak, Lamuru	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240021, Tanggal 09 Desember 2024
7	KM. Nur Ratu Indah 01	Kembung	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240026, Tanggal 17 Desember 2024
8	KM. Sinar Madina ERN	Katamba, kakap merah, kaneka, tenggiri, bubara, kerapu	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240030, Tanggal 19 Desember 2024
9	KM. Arian	Kerapu, katambak, ekor kuning, kakap	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240059, Tanggal 30 Desember 2024
10	KM. Portuna 01	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240044, 27 Des 2024 - 27 Des 2025
11	KM. Dirgantara	Yellowfin Tuna	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240045, 27 Des 2024 - 27 Des 2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

12	KM. Fauzan 01	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240064, Tanggal 30 Desember 2024
13	KM. Aisah 39	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 - 240065, Tanggal 30 Desember 2024

II. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CPIB di Tahun 2024

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	SMK Negeri 1 Maros	Berih Nila	C	ID. CPIB - T - 73 - 24000 - 3, Tanggal 25 November 2024

III. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Tahun 2024

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	SMK Negeri 1 Maros	Pembesaran Ikan Air Tawar di kolam	B	ID. CBIB - T - 73 - 240017, Tanggal 29 Desember 2024



Kegiatan Bimtek Teknis dan Sosialisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang baik di Kapal Perikanan



Kegiatan Inspeksi Cara Budidaya Ikan yang baik tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Inspeksi Cara Pembenihan Ikan yang baik tahun 2024

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Indikator Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Periode Tahun 2020 - 2023					Tahun 2024					Periode Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2023	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Ik Realisasi Semadep Target Tahun 2024	Ik Realisasi Semadep Target Tahun 2024	Target 2024	Ik Capaian Semadep Target Realisasi
Peningkatan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	-	72	72	88,3	148,14	148,14	-	-

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan;

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen melaksanakan sertifikasi kelayakan pengolahan, sertifikasi HACCP dan sertifikasi pengelolaan distribusi ikan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pasca panen di atas, diakomodir dalam Indikator Kinerja Utama Nomor 2 yaitu "Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)" , berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar yang ditandatangani di Bulan Oktober 2024 (Triwulan IV 2024).

Pada triwulan sebelumnya (Triwulan I-III 2024), kegiatan tersebut di atas dipisahkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)
3. Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, Official Control dan Traceability yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKNP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi

dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP, Official Control dan Traceability yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

%X =	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A =	Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B =	Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
xn =	Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Pada tahun 2024, realisasi sertifikasi HACCP sebanyak 392 sertifikat dari target 345 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) tahun 2024 sebanyak 78 sertifikat dari total rekomendasi teknis sebanyak 68 laporan dari Ditjen PDSPKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi SKP tersebut dihitung sejak tanggal 10 Oktober hingga 31 Desember 2024. Dengan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

demikian persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk (A) adalah :

$$A = \frac{392}{345} \times 100\% = 113,6\%$$

$$B = \frac{78}{68} \times 100\% = 114,7\%$$

$$\%X = \frac{113,6 + 114,7}{2}$$

$$= 114,2 \%$$

- Realisasi kegiatan sertifikasi HACCP sebesar 114,2 %, dari target 70 %.
Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar sebesar 163,1 %

Realisasi ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena satuan target berbeda. Pada tahun 2023 menggunakan satuan target jumlah ruang lingkup HACCP sedangkan pada tahun 2024 menggunakan satuan target persentase

- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 22 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Data Pendukung

No	Nama Kegiatan	Rapor Anggaran Awal	Rapor Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran a/s	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Bila Anggaran
				TW IV 2024		TW IV 2024		
1	Inspeksi HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Monitoring dan Evaluasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 130.000.000,-	Rp. 130.000.000,-	Rp. 129.412.978,-	99,55%	Rp. 128.205.680,-	79,34%	Rp. 587.022,-
2	Surveilans Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 128.580.000,-	Rp. 128.570.000,-	Rp. 128.171.111,-	99,69%	Rp. 121.954.181,-	97,99%	Rp. 197.778,-
3	Kerfasi Penerapan Sistem Traceability di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 110.000.000,-	Rp. 48.000.000,-	Rp. 47.983.189,-	99,99%	Rp. 9.948.000,-	20,71%	Rp. 56.752,-
	TOTAL	Rp. 368.580.000,-	Rp. 306.570.000,-	Rp. 297.585.000,-	100,40%	Rp. 272.144.111,-	100,62%	Rp. 821.552,-

IKU 2 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), sebelumnya merupakan IKU 4 dengan nama IKU yaitu Sertifikat Hazard Analysis Critical control point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yaitu Traceability dan Surveilans HACCP (Official Control) sebelumnya merupakan IKU yang berdiri sendiri.

Kegiatan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk) Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,55 %. Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 yang mencapai 99,50% maka realisasi tersebut hampir sama.

Kegiatan Surveilans Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,90 % Realisasi ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena bukan merupakan IKU di tahun 2023.

Kegiatan Verifikasi Penerapan Sistem Traceability di Unit Pengolahan Ikan Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,92 % Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 yang mencapai 99,63% maka realisasi tersebut hampir sama

Akar Masalah

Terdapat kegiatan pasca panen yaitu Sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, dan perlu diakselerasi pada tahun 2025

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 07 Oktober 2024 telah dilaksanakan diseminasi hasil pelatihan SIMHKP di ruang rapat Balai Besar KIPM Makassar oleh inspektur mutu yang telah mengikuti pelatihan di Hotel Oria Jakarta. Tujuan kegiatan diseminasi tersebut adalah meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada kegiatan sertifikasi hulu hilir.
2. Pada tanggal 28 – 30 Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan Traceability terhadap inspektur mutu di seluruh UPT BPPHKP dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Inspektur Mutu dari BPPMHKP dan 3 orang dari UPI Jakarta bertempat di hotel Grand Cokro Jakarta.
3. Pada tanggal 04 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil

kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan

4. Pada tanggal 24 - 26 Nopember 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Verifikator SKP di Hotel Arion Suites Bandung diikuti oleh Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP.
5. Pada tanggal 10 Desember 2024 dilaksanakan Indonesian Marine and Fisheries Business Forum 2024 bertempat di Hotel Raffles, Jakarta yang diikuti oleh 2 orang Inspektur mutu BPPMHKP Makassar. Kegiatan ini bertemakan Blue Food Competent Authority Dialogue yang bertujuan untuk mendorong geliat Investasi biru di Sektor Kelautan Perikanan dan sebagai sarana pertukaran informasi serta memperkuat hubungan baik dengan otoritas kompeten negara tujuan ekspor.
6. Pada tanggal 23 Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) bertempat di Hotel Harper Makassar yang diikuti oleh 100 orang pelaku usaha ekspor. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang ketentuan regulasi serta dapat menyederhanakan bisnis proses penerbitan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia.

Rekomendasi rencana aksi

Perlu akselerasi pelaksanaan sertifikasi SKP sesuai target yang ditetapkan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Inspeksi konsistensi Penerapan HACCP di CV. Najwa Bahari Tahun 2024



Kegiatan Inspeksi konsistensi Penerapan HACCP ruang proses di CV. Najwa Bahari

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Verifikasi Traceability di Unit Pengolahan Ikan PT. Siriman Jaya Abadi Tahun 2024



Kegiatan Verifikasi Traceability di Unit Pengolahan Ikan di ruang poses PT. Siriman Jaya Abadi Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Diseminasi Hasil Pelatihan SJMHKP di BPPMHKP Makassar tanggal 7 Oktober 2024



Kegiatan Rapat Koordinasi SJMHKP Hulu Hilir di BPPMHKP Makassar tanggal 04 Oktober 2024

IK.3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Keempat Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2018 - 2023					Tahun 2024					Rata-rata Balai Besar KIPM Makassar 2018 - 2024	
		2018	2019	2020	2021	2022	TARGET 2024	TARGET Tahunan 2024	Realisasi Tahunan 2024	Realisasi Tahunan: Target Tahunan 2024	Realisasi Tahunan: Target Tahunan 2024	TARGET 2024	Realisasi Tahunan: Target Tahunan 2024
Peningkatan pengelolaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan perikanan	3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	5	4	4	70	70	100	141,5%	142,5%	-

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang masuk ke sentra penyedia pangan sehat seperti pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sentra penyedia pangan sehat.

Pada triwulan I, II dan III satuan target masih menggunakan jumlah lokasi sedangkan pada triwulan IV tahun 2024 terjadi perubahan satuan target dari 4 lokasi menjadi 70% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV yang ditandatangani di bulan Oktober 2024. Indikator kinerja utama berubah dari "penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)" menjadi "persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)". Adanya perubahan satuan target dari 4 lokasi menjadi 70% menyebabkan perubahan formula yang sebelumnya menggunakan formula "jumlah lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik" menjadi "persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI". Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\% X = A/B \times 100\%$$

A = Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan hasil KP di wilayah RI

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yaitu :

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern lotte mart Panakkukang, pasar modern Lotte Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yang sama.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 dari target 4 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik telah terealisasi 4 lokasi dengan 11 titik pengawasan yaitu:

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar tradisional Sentral, pasar modern Lottemart Alauddin, pasar modern Hypermart Panakkukang, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 1 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa.
3. Kabupaten Takalar sebanyak 1 titik yaitu PPI Beba.
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 1 titik pengawasan yaitu pasar sentral Pinrang.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) di tahun 2024 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, Manager Pasar Modern, PPI/TPI.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional, pasar modern dan TPI/PPI serta mengisi check list Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya, dengan target pengujian yaitu organoleptik, Angka Lempeng Total (ALT), *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin.

Pada Tahun 2024 dari target 4 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik telah terealisasi 4 lokasi, sebanyak 14 titik pengawasan yaitu

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik lokus yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern Lottemart Panakkukang, pasar modern Lotte Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik lokus yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik lokus yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik lokus pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan
3. Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tabel 1. Kegiatan Utama dan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Utama dan Pendukung	Anggaran TA 2024	Realisasi Tr IV TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Utama)	60.000.000	57.235.865	95,39	2.764.135
2	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya (Pendukung)	80.000.000	78.603.744	98,25	1.396.256
3	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan (Pendukung)	13.070.000	13.070.000	100	0
4	Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (Pendukung)	288.656.000	285.590.425	98,96	2.995.575
Jumlah		441.726.000	434.500.034	98,36	7.225.966

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada sampel uji di 14 (empat belas) titik pengawasan selama tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. Triwulan I Kab. Gowa dan Kab. Takalar menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan.
2. Triwulan II Kota Makassar dan Kab. Pinrang menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Triwulan III Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pinrang dengan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan;
4. Triwulan IV Kota Makassar dengan hasil pengujian mikrobiologi dan kimia memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk pengujian organoleptik terdapat 15 sampel dengan lokus yang berbeda menunjukkan hasil uji dibawah standar persyaratan mutu (minimal 7).

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 terdapat sampel triwulan II dengan hasil pengujian sampel Kab. Takalar titik pengawasan PPI Beba sampel cumi-cumi segar (*cephalopods*) ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji *coliform* 7,4 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g dan titik pengawasan Pasar Sentral Takalar dengan sampel bandeng segar ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji *coliform* 3,6 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g. Untuk hasil uji beberapa sampel lainnya memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan;

Pada tahun 2022 terdapat sampel triwulan II dengan hasil pengujian untuk sampel *cephalopod* (cumi-cumi segar) dari lokasi Kota Makassar titik pengawasan pasar tradisional Terong ditemukan hasil pengujian formalin diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan 0 ppm, hasil uji 1,1 ppm) sedangkan hasil pengujian sampel dari beberapa titik lainnya memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000 dengan persentase capaian sebesar 95,39%. (Rp. 57.235.865)

Sebagai perbandingan anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp. 78,342,000, dengan persentase capaian sebesar 99,53% (Rp. 77.977.352).

Pada tahun 2022 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 78,437,513 dari pagu anggaran sebesar Rp. 78,448,000 dengan persentase capaian sebesar 99,99%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pagu Anggaran kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya tahun 2024 sebesar Rp. 80.000.000 dengan persentase capaian sebesar 98.25% (Rp. 78.603.744).

Pagu anggaran Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan sebesar Rp. 13.070.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar Rp. 288.656.000 dengan persentase capaian sebesar 98.96% (Rp. 285.590.425)

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2024 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 12 orang dari Dinas Perikanan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 2 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Sebagai Perbandingan Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2023 yaitu inspektur mutu sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 15 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 3 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang

Adapun untuk tahun 2022, Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik yaitu inspektur mutu sebanyak 19 orang sedangkan

pendamping kegiatan sebanyak 11 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Akar Masalah

1. Tw I, Hasil Penilaian terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hygiene di sentra penyedia pangan sehat (pasar tradisional balang-balang dan pasar sentral Takalar) menunjukkan kondisi **Cukup**. Sementara untuk penyedia sentra pangan yang lain menunjukkan kondisi **Baik**.
2. Tw II, Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada TW II (seharusnya dilakukan kegiatan pada bulan april, namun baru terlaksana pada bulan Mei 2024). Hal ini disebabkan karena inspektur mutu sebagai pelaksana kegiatan tidak konsisten dalam mentaati jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tw III, Kondisi sarana dan prasarana serta pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dikonsumsi khususnya di pasar tradisional dan PPI/TPI masih kurang hal ini ditemukan secara berulang-ulang dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.
4. Tw IV Potensi masalah: pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi serta pentingnya menjaga sanitasi masih kurang, sehingga akan memicu munculnya kontaminasi bakteri patogen.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

1. Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 yaitu sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi pada tanggal 16 februari 2024 dan melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 2 lokasi yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

2. Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu telah menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, melalui surat penyampaian nomor B.1.187/BKIPM.MKS/TU.140/V/2024 dan B.1.188/BKIPM.MKS/TU.140/V/2024 perihal pemberitahuan hasil penilaian sarana prasarana pengawasan mutu domestik.
3. Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan III tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang:
 - a. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa' Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1909/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
 - b. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan Kabupaten Pinrang terhadap pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya yang nilainya CUKUP pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1910/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
 - c. Mengikuti Kegiatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik Pada tanggal 3 - 5 Juli 2024 bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan IV tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Kota Makassar dengan 8 titik pengawasan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- a. Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik pada tanggal 31 Oktober – 1 Nopember 2024 di Hotel Harper Yogyakarta.
- b. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa' Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Nopember 2024 dengan nomor surat B. 2817/BBKIPM.MKS/TU.140/XI/2024.

Rekomendasi rencana aksi

1. Melakukan koordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir.
2. Mendorong kepada para pelaku usaha di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi



Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di kab. Gowa



Kegiatan Edukasi dan penyadartahuan tentang ikan sehat bermutu kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik di Surabaya

IK 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Utama	Kategori Utama (K)	Tahun 2023-2024					Tahun 2024				Rasio Balai Besar KIPM Makassar 2023-2024	
		2023	2024	2023	2024	2023	Target 2024	Target Tahunan 2024	Rasio Tahunan 2024	Rasio Tahunan 2024	Target 2024	Rasio Tahunan 2024
Terselenggara kegiatan dengan anggaran mutu hasil ekspor dan perikanan	4. Rasio Besar dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik;

Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan tangkap melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor ke negara tujuan.

Badan Mutu KKP Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Badan Mutu KKP Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor.

Pada Tahun 2024 didapatkan total volume ekspor komoditi hasil perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 201.002 Ton senilai 9,014 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 9.992 sertifikat, sedang di Tahun 2023 didapatkan jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan sebanyak 9.701 sertifikat, didapatkan peningkatan jumlah sertifikat sebesar 3,0 %;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor Mutu (HC) Yang Memenuhi Persyaratan



■ Tahun 2022 ■ Tahun 2023 ■ Tahun 2024

Indikator Kinerja Rasio Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

dimana :

A : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang terbit}} \times 100\%$

Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi. Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan

B : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC mutu ekspor yang terbit}} \times 100\%$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

$$: \frac{9.992 - 0}{9.992} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, dari Triwulan I hingga Triwulan IV didapatkan realisasi sama yaitu 100 % dikarenakan tidak adanya kasus penolakan oleh negara tujuan;

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 19 orang dan didukung oleh tenaga PNPB sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	3989.ADF.001.051.a. Sertifikasi CPiB pada suplier hasil perikanan	Rp. 25.925.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.436.000,-	99,80 %	Rp. 64.000,-
2	3989.ADF.001.051.b. Bimbingan Teknis CPiB Supplier	Rp. 6.575.000,-	0	0	0	0
3	3989.ADF.001.051.c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	100 %	0
4	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 20.000.000,-	Rp. 17.000.000,-	Rp. 16.905.000,-	99,44 %	Rp. 95.000,-
	TOTAL	Rp. 60.000.000,-	Rp. 57.000.000,-	Rp. 56.841.000,-	99,72 %	Rp. 159.000,-

Perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak bisa diukur disebabkan oleh perbedaan kegiatan pendukung IKU. Pada Tahun 2023 tiap kegiatan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

terakomodir pada masing masing IKU, sedang pada Tahun 2024 beberapa kegiatan tergabung dalam 1 (satu) IKU sehingga tidak bisa dilakukan pembandingan jumlah realisasi anggaran.

Sertifikasi CPIB pada unit pemasok produk perikanan pada tahun 2024 berdasarkan jumlah unit pemasok, didapatkan realisasi sebanyak 11 (sebelas) unit pemasok dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- realisasi sebesar Rp. 32.436.000,- atau 99,80 %, sedangkan anggaran kegiatan Bimbingan Teknis CPIB pada supplier pada TW IV Tahun 2024 mengalami realokasi anggaran ke kegiatan surveilan pengendalian mutu pasca panen sehingga ditiadakan penyelenggaraannya.

Terdapat perbedaan satuan target antara kegiatan CPIB Tahun 2023 dan Tahun 2024, yaitu pada Tahun 2023 target capaian berdasarkan jumlah sertifikat yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat, sedangkan Tahun 2024 target capaian berdasarkan jumlah unit pemasok, sehingga realisasi pelaksanaan tidak bisa dibandingkan.

Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra pada Tahun 2024 sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar 73,35 % hingga Triwulan III, dan pada TW IV 2024 sisa anggaran Rp. 1.999.000 dialihkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPI dan terealisasi 100%.

Kegiatan investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan pada Tahun 2024 didapatkan tidak adanya kasus penahanan/ penolakan pada negara tujuan sehingga keberterimaan produk perikanan adalah 100% Anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan IV 2024 dialihkan ke kegiatan surveilan HACCP dan didapatkan realisasi sebesar 99,44%.

Dengan demikian total realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 56.841.000,- atau 99,72 %

Akar masalah

- Tahun 2024 potensi masalah berfokus pada proses penerbitan sertifikat HC Mutu Ekspor, masalah dapat terjadi jika :
 - a. petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC);
 - b. Petugas pelayanan dalam melakukan penerbitan maupun pemberian stempel pada lembaran HC sehingga kemungkinan akan adanya penolakan atau pengembalian lembaran HC dari otoritas kompeten pada negara tujuan;
 - c. Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan konsistensi penerapan HACCP pada Unit Pengolah Ikan dalam melakukan penilaian organoleptik lapangan kurang akurat sehingga nilai organoleptik produk yang didapatkan tidak tepat.
- Pada Tahun 2025 kegiatan sertifikasi CPIB (Cara Penanganan dan Pengolahan Yang Baik) pada unit pemasok akan berubah menjadi SPDI (Sertifikat Pendistribusian Ikan), sehingga diperlukan sosialisasi ke Inspektur Mutu, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan akan adanya perubahan sistem proses penerbitan sertifikasi tersebut

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait ketentuan negara tujuan ekspor pada tanggal 29 Januari 2024;
- Telah dilaksanakan Sharing Session dengan Inspektur Mutu terkait peningkatan kompetensi inspektur mutu dalam pelaksanaan SJMKHP pada tanggal 20 Mei 2024 guna meningkatkan kompetensi petugas verifikator;
- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 20 Juni 2024 guna meminimalisir terjadinya gratifikasi pada pelaksanaan SJMKHP;

- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat;
- Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Terlatih Pengujian Organoleptik Sensori yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu pada tanggal 26 September 2024 guna meningkatkan kompetensi petugas pengendalian mutu;
- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat.
- Agar tidak terjadinya kasus penolakan ataupun pengembalian lembaran Health Certificate dari otoritas negara tujuan maka dilakukan pemeliharaan perangkat peralatan penerbitan HC
- Telah dilakukan sosialisasi perubahan system proses penerbitan sertifikasi penjaminan mutu kepada seluruh stakeholder terkait, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan beralokasi di Sulawesi Selatan, adapun kegiatan yang telah diadakan yaitu :
 - a. Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan pada tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan sebanyak 40 orang. Pada kegiatan tersebut disampaikan kebijakan SJMHKP dan persyaratan ekspor ke negara mitra/negara tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan;

- b. Sosialisasi penerbitan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan oleh PLT, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP Ibu Tri Handayani pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar dan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu;
- c. Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan pada tanggal 04 November 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan;
- d. Telah mengikuti workshop kasus penolakan/penahanan produk perikanan pada tanggal 4-6 Desember 2024 bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen, workshop ini bertujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI dinegara tujuan baik masalah teknis dan non teknis serta menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari Inspektur Mutu BPPMHKP se Indonesia, penanggung jawab mutu di UPI serta instansi terkait;
- e. Sosialisasi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2024 bertempat di Hotel Harper Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Kegiatan ini untuk

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Rekomendasi rencana aksi

- Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP No. 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP kepada Inspektur Mutu dan petugas pelayanan.
- Melakukan koordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada kegiatan yang mendukung IKU tersebut.



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Rapat Koordinasi pemenuhan persyaratan ekspor di Negara Tujuan

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar di dukung 1 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 1 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang sesuai standar 1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %

IK5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2019-2023					Tahun 2024					Rata-rata Balai Besar KIPM Makassar 2019-2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Tahun 2024
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5. Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70	70	70	70	70	70	70	68,1	100,0%	100,0%	70	97,3%

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi

menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Berdasarkan Surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah sebesar 81,35. Untuk nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah sebesar 84,85.

Untuk menghitung nilai IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi, maka digunakan rumus :

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana :

% X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Jika nilai penerapan ISO 17020 dan ISO 17025 berdasarkan hasil audit internal dan eksternal dimasukkan dalam rumus, maka diperoleh :

$$\%X = \frac{84,85\% + 81,35\%}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 83,10 \%$$

Nilai ini masih memenuhi target IKU sebesar 70%.

IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi ini merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga belum dapat dibandingkan dengan nilai IKU pada tahun-tahun sebelumnya.

Sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah sebanyak 22 orang inspektur mutu yang melaksanakan inspeksi dan surveilan ke Unit Pengolahan Ikan untuk penerapan SNI ISO/IEC 17020 dan juga melaksanakan pengujian laboratorium untuk penerapan SNI ISO/IEC 17025.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 9 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 9 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 3,36 Indeks
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 86 Indeks
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 82 Nilai
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 71 Nilai
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar]	5. 93,76 Nilai
6. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 100 persen
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 80 Persen
8. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 80 persen
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT lingkup Balai Besar KIPM Makassar	9. 80 Persen

IK6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Data	Indikator Kinerja (IK)	Nilai Tahun 2021-2023					Tahun 2024				Rata-rata Nilai Besar KIPM Makassar 2021-2024	
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2024	Target Tahun 2024	Nilai Realisasi Tahun 2024	5. Rata-rata Indeks terhadap Target Tahun 2024	6. Rata-rata Indeks terhadap Target Tahun 2024	7. Target 2024
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	85,8	81,02	84	838	877	100,00	100,00	-

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :

1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Impor**)
3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (**PMMT/ HACCP**)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

4. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana $df = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0,05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (jika tidak diketahui maka $P = 0,5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$S = \frac{3,841 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \times 47} + (3,841 \times 0,5 \times 0,5)$$

$$S = \frac{46,092}{0,00235} = 42,796 = 43$$

Selama tahun 2024, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan jumlah responden sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah Layanan	Jumlah Minimal Responden	Jumlah Responden	Keterangan
I	2.444	335	257	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan perbaikan dengan penunjukan customer service pelayanan
II	2.156	327	207	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan perbaikan dengan mengoptimalkan monitoring pengisian SKM

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

III	2.603	338	674	Jumlah responden telah mencukupi
IV	2.845	341	404	Jumlah responden telah mencukupi

Dari jumlah responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat bahwa pada Triwulan I dan II jumlah responden belum mencukupi jumlah minimal responden sesuai dengan Formula Isaac & Michael. Namun dengan perbaikan terus menerus maka jumlah responden telah dapat ditingkatkan pada Triwulan III dan IV dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Jika dilihat dari nilai per unsur dapat terlihat bahwa pada tahun 2024 ini unsur yang sering memiliki nilai paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Pada pelayanan Balai Besar KIPM Makassar digunakan Aplikasi PPK Online dan Sister Karoline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Terkadang aplikasi tersebut mengalami kendala dan memperlambat proses pelayanan. Telah direncanakan akan menggunakan sistem baru sesuai dengan tugas dan fungsi baru BPPMHKP yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu (SIAP Mutu) pada bulan Maret 2025.

Akar Masalah

- Telah dipastikan penggunaan aplikasi Sister Karoline versi 6.002 yang terbaru pada sistem pelayanan untuk mendukung format Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).
- Telah dilakukan perpindahan layanan dari kantor pelayanan BKIPM yang telah dialihkan ke Barantin berpindah ke kantor administrasi di kantor induk pada bulan November tahun 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

DOKUMENTASI PERPINDAHAN RUANG PELAYANAN BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM Balai Besar KIPM Makassar

Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Tahun 2023-2025					Tahun 2024					Rencana Balai Besar KIPM Makassar 2023-2025	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi Target Tahun 2024	% Realisasi Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian Target Tahun 2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tingkat UPT Balai Besar KIPM Makassar	Indeks Profesionalitas ASN tingkat Balai Besar KIPM Makassar	-	80	85	87,5	90	80	80	80,76	101,55	126,92	-	-

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang ASN dengan nilai maksimal bobot 25.

Nilai pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan jenjang jabatan :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	23	20	15	10	5

2. Kompetensi adalah pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan seminar dengan nilai bobot 40.

Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun;
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe "Diklat Fungsional atau Diklat Teknis" yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP;
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosial Kultural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir;

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- a. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
- b. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
- c. Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum, maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5

3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30

Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai 30 (Sangat baik)
- b. Nilai 25 (Baik)
- c. Nilai 20 (Butuh perbaikan)
- d. Nilai 15 (Kurang)
- e. Nilai 10 (Sangat kurang)

Tabel gambar

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5
Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplin sebagai berikut :

- a. Tidak Pernah 5
- b. Ringan 3
- c. Sedang 2
- d. Berat 1

Target Tahunan IP ASN 2024 adalah 86 :

Semester I : 81

Semester II : 86

Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3	:	= 0 pegawai x 25	= 0
2. S2	: - Jabatan Pimpinan Pratama	= 0 pegawai x 23	= 0
	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 8 pegawai x 23	= 184
			<u>184</u>
3. S1	: - Jabatan Fungsional Keahlian	= 13 pegawai x 20	= 260
	: - Jabatan Pengawas	= 1 pegawai x 21	= 21
	: - Jabatan Pelaksana	= 5 pegawai x 22	= 110
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 0 pegawai x 22	= 22
			<u>391</u>
4. D3	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 4 pegawai x 21	= 84
	: - Jabatan Pelaksana	= 1 pegawai x 21	= 21
			<u>105</u>
5. SMA	: - Jabatan Pelaksana	= 4 pegawai x 20	= 80
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	= 1 pegawai x 20	= 20
			<u>100</u>
Jumlah Total			780

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{780}{37} = 21,08$$

Jadi pada tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kualifikasi pendidikan **21,08**.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

-	31 pegawai ASN mendapat nilai 40	= 34 x 40	= 1.360
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 39,25	= 1 x 39,25	= 39,25
-	2 pegawai ASN mendapat nilai 34,75	= 2 x 34,75	= 69,5
	Jumlah		= 1.468,75

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.468,75}{37} = 39,7$$

Jadi pada 2024 diperoleh nilai rata-rata kompetensi ASN sebesar 39,7.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 37 orang ASN memperoleh nilai Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) dengan predikat baik sehingga mendapat bobot nilai $25 = 37 \times 25 = \underline{925}$

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{925}{37} = 25$$

Jadi pada tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kinerja 25

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 37 orang ASN mendapat nilai $5 = 37 \times 5 = 185$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{185}{37} = 5$$

Jadi pada tahunan 2024 diperoleh nilai rata-rata disiplin 5.

Dengan demikian, untuk tahun 2024 nilai capaian IP ASN adalah :

1. Kualifikasi pendidikan = 21,08 IP
2. Kompetensi = 39,7 IP
3. Kinerja = 25 IP
4. Disiplin = 5 IP

$$\begin{aligned}\text{Nilai Realisasi IP ASN} &= \text{Kualifikasi Pendidikan} + \text{Kompetensi} + \text{Kinerja} + \text{Disiplin} \\ &= 21,08 + 39,7 + 25 + 5 \\ &= 90,78\end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan nilai IP ASN tahun 2023 yang besarnya 90,27 maka terjadi peningkatan sebesar 0,51.

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 86,07 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 90,78 masih lebih tinggi dengan selisih 4,71
2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP dengan nilai IP ASN 88,74 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 90,78 masih lebih tinggi dengan selisih 6,2

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> pertanggal 10 Januari 2025

Seluruh pegawai ASN sebanyak 37 orang terlibat dalam pencapaian target indikator ini, yang terdiri dari :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Pjt. Kepala	1
2.	Kepala Subbagian Umum	1
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan/Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	19
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1
6.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1
7.	Arsiparis	1
8.	Fungsional Umum	9

SDM pengelola yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 5 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum dan pengelola kepegawaian terdiri dari Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan;

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran semula Rp. 77.285.000,- menjadi Rp.73.833.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	12.000.000	11.000.000
2.	Refreshment panelis organoleptik	3.560.000	3.560.000
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	25.211.000	22.759.000
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.514.000
	Jumlah	77.285.000	73.833.000

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.833.000,- dapat direalisasikan Rp. 73.434.365,- atau 99,46%, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	11.000.000	10.966.430	99,69
2.	Refreshmen panelis organoleptik	3.560.000	3.450.840	96,93
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	22.759.000	22.749.660	99,95
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.267.435	99,32
	Jumlah	73.833.000	73.434.365	99,46

Jika dibandingkan dengan periode yang sama yakni tahun 2023 yang realisasi anggarannya 99,79% (pagu anggaran Rp.80.337.000,- realisasi Rp. 80.174.773,-), maka terjadi penurunan sebesar 0,33%.

Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website www.ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn

Akar masalah

Potensi masalah menurunnya nilai IP ASN jika terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat pengembangan kompetensi namun tidak segera melakukan penginputan hasil diklat ke dalam akun myASN pegawai yang bersangkutan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Telah dilakukan *update* data pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke Badan Karantina Indonesia pada aplikasi SIMPEG;
- 2) Menyampaikan kepada pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan/seminar/webinar, diklat dan pengembangan kompetensi lainnya terutama untuk kegiatan diklat yang memiliki Jam Pembelajaran 20 JP dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;
- 3) Melakukan rekapitulasi sertifikat pelatihan pegawai secara berkala;
- 4) Menyampaikan dan monitoring pegawai untuk melakukan *update* data diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id* minimal sebulan sekali;
- 5) Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*;

Rekomendasi rencana aksi

- 1) Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*;
- 2) Menyampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IP ASN 2024 Dashboard: Eselon Pegawai : BAO IP ASN 2023										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Tetap	Kualifikasi (Jabat 20)		Kompetensi (Jabat 40)		Kinerja (Jabat 30)		Disiplin (Jabat 10)	
			P	Presentase	M	Presentase	P	Presentase	P	Presentase
1	KELOMPOK BINA KEMAMPUAN WILAYAH KABUPATEN	46	2100	84.34 %	5750	81.08 %	26	81.25 %	5	100 %
2	KANTOR BINA KEMAMPUAN WILAYAH	26	2170	84.62 %	5424	81.28 %	21	81.21 %	5	100 %
3	KANTOR PENGENDALIAN DAERAH	20	2100	82.5 %	5148	81.7 %	21.28	84.17 %	5	100 %
4	KANTOR PENGENDALIAN DAERAH	20	2032	82.28 %	502	85.5 %	20	85.33 %	5	100 %
5	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	9	7	88.9 %	3507	81.87 %	20	85.38 %	5	100 %
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	37	2100	84.32 %	5817	86.25 %	20	81.21 %	5	100 %
7	BALAI KIPM JENDRAL	9	2100	86.78 %	3834	85.83 %	20	81.22 %	5	100 %
8	BALAI KIPM GUNUNGREJO	67	2100	84.44 %	5889	81.47 %	23.7	83.7 %	5	100 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IP ASN 2024												
Dashboard Daftar Laporan FAQ IP ASN 2023												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Tetap	Kualifikasi Jabat		Keterampilan Jabat		Kemampuan Jabat		Disiplin Jabat		TOTAL Rata-rata	
			Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase	Persentase				
1	KELOMPOK BOPK PUSAT KIPM PUSAT KIPM KELUARAN KIPM	88	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
2	PUSAT KIPM	28	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
3	PUSAT KIPM PUSAT KIPM PUSAT KIPM	29	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
4	PUSAT KIPM PUSAT KIPM PUSAT KIPM	29	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
5	BALAI BESAR KIPM	17	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
6	BALAI BESAR KIPM	31	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
7	BALAI BESAR KIPM	18	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800
8	BALAI BESAR KIPM	47	218	83.5%	218	83.5%	218	83.5%	5	100%	88.5	7800

39

IK 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

[illegible]

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2020-2024, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen Renstra 2020-2024, Renja dan Rencana Aksi yang telah terealisasi Tahun 2024, hingga mencapai 30%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2024, Aspek ini telah terselesaikan tahun 2024, hingga mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024,

Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.,

Aspek ini terselesaikan tahun 2024, hingga mencapai 15 %.

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Aspek ini telah diselesaikan , sehingga mencapai 25%.

Dengan demikian realisasi capaian indikator ini tahun 2024 adalah

Nilai Triwulan I + Nilai triwulan II + Nilai Triwulan III + Nilai Triwulan IV

$30+30+15+25 = 100\%$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Adapun Pencapaian Indikator ini tahun 2024 yaitu 83,80 pencapaian ini melebihi dari target 82, Tahunan 2023 melebihi target 85 dari yang ditetapkan dan realisasi mencapai nilai 87,13 jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasinya 95,3 .
- Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang mengalami beberapa revisi terdiri dari :

Kegiatan	Anggaran			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3987.EBA.958. Layanan Hubungan masyarakat	Rp 12.470.000	Rp 10.970.00,-	Rp 12.575.000,-	Rp 12.575.000,-
BA.963 Layanan Data dan Informasi	Rp 14.028.000	Rp 14.028.000	Rp 26.093.000,-	Rp 26.093.000,-
Jumlah	Rp 26.498.000,-	Rp 24.998.000,-	Rp 38.668.000,-	Rp 38.668.000,-

- Adapun realisasi sampai pada tahun 2024 sebesar Rp 38. 655.199 atau 99,96 % , tahun 2023 anggaran sebesar Rp11.600.000 telah terealisasi sebesar Rp.11.599.584 atau 99,99% ,sedangkan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp24.000.000 dengan realisasi Rp23.973.570 atau 99,89% .

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Berdasarkan surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan No. B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP dapat dibandingkan Nilai SAKIP Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai 82,80 (Predikat A), Balai KIPM Denpasar dengan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Nilai SAKIP dengan nilai 83,10 (Predikat A) sedangkan Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai 83,80 (Predikat A)

Akar Masalah

Capaian perencanaan belum optimal disebabkan Renja masih dalam proses perbaikan

- Adanya potensi keterlambatan penyelesaian laporan kinerja dari setiap kegiatan untuk triwulan I tahun 2024
- Adanya perubahan target tahunan pada Indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) semula 60 Sertifikat menjadi 23 Sertifikat
- Berdasarkan hasil reviu Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 9-14 Juli 2024 dinyatakan bahwa pada kolom tindakan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan peningkatan kompetensi/*sharing session* belum dapat menggambarkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut
- Adanya perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dimana ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang berubah yaitu :1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), 3). Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan laporan kinerja tahunan 2023 melalui aplikasi ESR Kemperan RB
- Telah dilakukan dialog kinerja tanggal 2 Februari 2024 dimana salah satu substansi penyampaian materi adalah dokumen penetapan kinerja tahun 2024, selain itu juga dibahas strategi, risiko dan rencana aksi organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja.
- terselesaikannya Rencana Kerja Tahun 2024
- Telah mengupload data dukung penilaian Mandiri SAKIP pada aplikasi Kinerjaaku
- PLT Kepala Balai Besar KIPM Makassar kepada Sekretaris BPPMHKP No. B.1270/BBKIPM.MKS/TU.140/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 Perihal Usulan revisi target kegiatan traceability tahun 2024.
- Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2455/BPPMHKP.1/TU.330/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diadakan di Bandung yang dihadiri oleh Tim Itjen, perwakilan dari Pusat Pengendalian Mutu, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Bandung.
- telah melakukan revisi Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Itjen meliputi benchmark Indikator IP ASN, Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar
- Melengkapi informasi pada LKJ, terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan informasi keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja beserta upaya nyata perbaikannya
- Telah Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU pada indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan /atau pengolahan ikan menerapkan sistem traceability

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Telah terselesainya laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024
- Telah Melakukan sosialisasi Hasil revidir Itjen KKP yang terkait perlunya output kegiatan yang tercantum pada laporan kinerja pada rapat evaluasi dan capaian kinerja III pada tanggal 8 – 10 Oktober 2024.
- Telah dilaksanakan rapat pembahasan realisasi anggaran dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada tanggal 11 Oktober 2024. Point point rapat pembahasan tersebut antara lain : a). Tindak Lanjut arahan dari Sekretaris BPPMHKP terkait langkah langkah menghadapi akhir tahun anggaran, b). masih relative banyaknya anggaran yang belum terserap di triwulan IV sehingga perlu percepatan realisasi anggaran, c). adanya PK perubahan di Triwulan IV pada produksi primer dan pasca panen menyebabkan penyesuaian kembali kegiatan pada triwulan IV, d). Penambahan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer dan pasca panen sehingga mengharuskan adanya koordinasi dengan instansi terkait (DKP Provinsi/Kab/Kota/Eselon I terkait).

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan penyampaian laporan Kinerja Triwulan IV dan LKj Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Revidir tepat waktu

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Rapat Target dan Evaluasi Kinerja Tahunan 2024

IK 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2023-2024					Tahun 2024					Tahun Balai Besar KIPM Makassar 2023-2024	
		2023	2024	2023	2024	2025	Target 2024	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	5. Persentase Target Tahun 2024	6. Persentase Target Tahun 2024	Target 2024	6. Capaian Persentase Target Tahun 2024
Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik (P3T) Balai Besar KIPM Makassar	5. Realisasi Perencanaan anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar			88	87,87	88,3	75	75	88,37	88,88	88,88	75	75

Kementerian Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan

fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

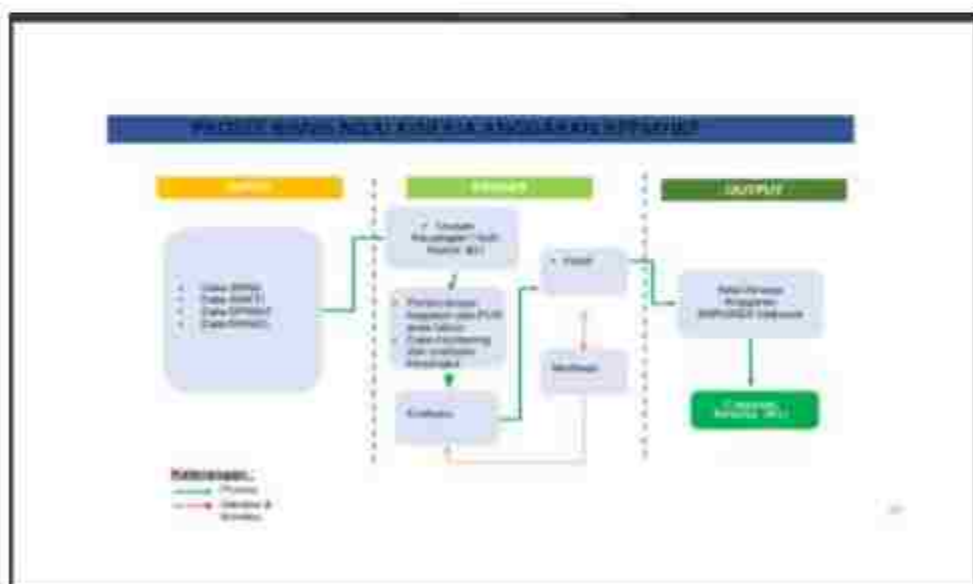
Untuk memantau Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar terjadi perubahan dari target 82 nilai menjadi 71 nilai.

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat perubahan pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Nilai Kinerja (%)				Ket.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	0	11,92	27,46	49,79	
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0	35,54	48,78	48,58	

Tabel Total Nilai Kinerja Anggaran
Tahun 2024 sebagaimana pada tabel :

No	Uraian Kegiatan	(%)				Ket.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Total Nilai Kinerja Anggaran	20,75	47,46	74,24	98,37	
2	Nilai	-	Sangat Kurang	Cukup	Sangat Baik	

Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Tahun 2024 adalah “ Sangat Baik ” artinya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Sangat Baik, dan perlu dipertahankan Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

1. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran : Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Dibawah ini adalah Dasboard aplikasi yang menampilkan Nilai kinerja Perencanaan Anggaran.
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : Pengukuran Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran di dukung oleh Bindikator yaitu: Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian output dan Dispensasi SPM

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Berikut adalah Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai dan nilai akhir Tahun 2024 masing-masing indikator:

1. TW 1 : **Penyerapan** (nilai = 30 dan Nilai Akhir = 2,91), **Konsistensi** (nilai = 98 dan Nilai Akhir = 17,84), **Capaian Realisasi Output** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0) dan **Efisiensi** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0)
2. TW 2 : **Revisi DIPA** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Deviasi Hal 3 DIPA** (nilai = 13,24 dan Nilai Akhir = 15), **Penyerapan Anggaran** (nilai = 17,78 dan Nilai Akhir = 18,93), **Belanja Kontraktual** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Capaian Output** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 25), **Dispensasi SPM** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0)
3. TW 3 : **Revisi DIPA** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Deviasi Hal 3 DIPA** (nilai = 90,78 dan Nilai Akhir = 15), **Penyerapan Anggaran** (nilai = 94,67 dan Nilai Akhir = 20), **Belanja Kontraktual** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Capaian Output** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25);
4. TW IV : **Revisi DIPA** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Deviasi Hal 3 DIPA** (nilai = 92,15 dan Nilai Akhir = 13,82), **Penyerapan Anggaran** (nilai = 96 dan Nilai Akhir = 19,2), **Belanja Kontraktual** (nilai = 92 dan Nilai Akhir = 9,2), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 99,34 dan Nilai Akhir =

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

9,93), **Capaian Output** (nilai =100 dan Nilai Akhir = 25) dan **Dispensasi SPM** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0)

Aplikasi Monev Kemenkeu tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya perbedaan indikator pengukuran untuk mendapatkan nilai Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023 adalah 98,37 % dan 86,20 %, terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 12,17 %.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar TW1 dan TW2 sebesar 71.621.000, dengan realisasi pada TW1 sebesar Rp 52.691.384 atau 73,57%, realisasi pada TW2 sebesar Rp. Rp62.710.204 atau 87,56%, realisasi pada TW3 sebesar Rp. 74.642.304 atau 93,12% dan TW 4 adanya revisi penambahan pagu sehingga menjadi Rp 80.159.000. Adapun realisasi Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 79.998.804 atau 99,80 % yang digunakan untuk:

- TW 1 : Rapat kerja teknis BKIPM dan Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan;
- TW 2 : Belanja bahan dan Belanja perjalanan dinas biasa;
- TW 3 : Belanja ATK dan Belanja perjalanan dinas biasa;
- TW 4 : Belanja ATK dan Belanja perjalanan dinas biasa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pagu sebesar Rp. 45.626.00 dengan realisasi anggaran 45.623.975 atau 99,99 % sedangkan pada tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 99.022.000 dengan realisasi anggaran 2023 adalah Rp. 98.502.467 atau 99,48 % terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran sebesar 0,32 %. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IKU ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Akar masalah

TW 1 : Potensi masalah yang terjadi karena blm adanya himbauan dari kementerian keuangan untuk melakukan penginputan capaian output yang merupakan salah satu variabel dalam perhitungan NKA(Aplikasi belum siap) sehingga perhitungan NKA pada satker Balai Besar KIPM Makassar masih dalam proses;

TW 2 : Operator belum memahami proses bisnis dari Aplikasi Monev Keuangan sehingga belum bisa mengetahui perhitungan setiap komponen atau indikator dari pengukuran Nilai Kinerja Anggaran;

TW 3 : Penyerapan anggaran di TW III belum mencapai target 75%. Realisasi di TW III 2024 baru mencapai 64%.

TW 4 : Kurang optimalnya staff KPA dan Staff PPK dalam memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024 sehingga penyerapan anggaran tidak optimal

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

TW 1 : Menindaklanjuti rekomendasi triwulan IV 2023 operator smart dja telah melakukan komunikasi dengan petugas KPPN Makassar II terkait pelatihan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI namun pada triwulan I 2024 baru dapat dilaksanakan pelatihan implementasi aplikasi MonSAKTI (BMN, Persediaan, dan GLP)

TW 2 : - Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024 pada tgl 3 April 2024;

- Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 di Wilayah KPPN Makassar II

TW 3 : Operator telah melakukan konsultasi terkait proses bisnis Monev Kementerian Keuangan pada layanan SAPA ANGGARAN.

TW 4 : - Telah dilaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW 4 Tahun 2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. Adapun poin-poin rapat tersebut antara lain :

- Tindaklanjuti arahan dari Sekretaris BPPMHKP terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran;
- Masih relatif banyaknya anggaran yang belum terserap di triwulan 4 sehingga perlu percepatan realisasi anggaran

Rekomendasi rencana aksi

- Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran



Rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk tahun 2024

IK 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKP)	Maret 2024 - 2024					Tahun 2024					Kinerja Balai Besar KIPM Makassar 2024 - 2024	
		2024	2024	2024	2024	2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan UPT Balai Besar KIPM Makassar	10. Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	88	88	88,81	100,00	88,70	88,70	87,58	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup :

1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper;
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 - a. Capaian Output (25%)

Capaian nilai IKPA pada tahun 2024 sebesar 97,16 dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.
Pada tahun 2024 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah :
$$(100/100) \times 10\% = 10\%$$
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi

anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN sampai Desember 2024 sebesar 92,15 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DIPA adalah $(92,15/100) \times 15\% = 13,82\%$.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi Monev PA 95,77 maka diperoleh bobot sebagai berikut :

$$95,77 \times 20\% = 19,15\%$$

Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker, dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja (1) Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%), (2) Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%), dan (3) Komponen akselerasi kontrak (bobot 20%).

Sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat kontrak dini, belanja modal dan akselerasi kontrak, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$- \text{Akselerasi kontrak dini} : 1 \times 40\% = 40$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Akselerasi belanja modal : $1 \times 40\% = 40$
- Akselerasi kontrak : $1 \times 20\% = 20$
- Jumlah : $= 100$

Dengan demikian capaian indikator kinerja belanja kontraktual adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

- b. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra.

Pada tahun 2024 seluruh SPM-LS kontraktual telah disampaikan tepat waktu sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$100 \times 10\% = 10$$

- c. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP kartu kredit pemerintah, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) Pengelolaan UP dan TUP tunai (bobot 90%), dan (2) Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah (bobot 10%). Untuk pengelolaan UP dan TUP tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari (1) Ketepatan waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP (bobot 25%), dan (3) Setoran TUP (bobot 25%).

Pada tahun 2024 pengelolaan UP dan TUP dihitung sebagai berikut :

- (1) Perhitungan nilai pengelolaan UP dan TUP tunai :

- Ketepatan waktu : $100 \times 50\% = 50$
- Persentase GUP : $100 \times 25\% = 25$
- Setoran TUP : $100 \times 25\% = 25$

Jumlah = 100

Jadi nilai UP dan TUP tunai adalah : $(100/100) \times 90\% = 90$

(2) Perhitungan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah :

Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga nilainya adalah 100.

Jadi nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

Dengan demikian nilai kinerja pengelolaan UP dan TUP adalah : $(90 + 10)/100 \times 10\% = 10\%$.

- d. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di tahun 2024.

Pada tahun 2024 tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan tahun 2024, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu	: 100 x 30%	= 30
- Capaian RO	: 100 x 70%	= 70
	Jumlah	= 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah $(100/100) \times 25\% = 25\%$.

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DPA	Desain PM II DPA	Pemrosesan Anggaran	Belanja Kontribusi	Pembiayaan Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Sponsasi PM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	91,15	96	91	100	99,94	0	100	97,16
Bobot	10	15	20	15	10	10	0	15	
Nilai Akhir	20	13,67	19,2	13	10	9,99	0	15	
Nilai Akhir	96,78		96,94					100	

Dibandingkan dengan realisasi IKPA pada tahun 2024 sebesar 97,16, realisasi IKPA tahun 2023 sebesar 96,28 dan realisasi IKPA tahun 2022 sebesar 96,44, capaian IKPA Balai Besar KIPM Makassar berada dalam kategori sangat baik dengan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar sudah memadai.

Tahun 2024 seluruh Satker lingkup KKP mengampu indikator kinerja di atas termasuk unit kerja eselon I lain di KKP, seperti Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Perikanan yang memiliki eselon setara dengan Balai Besar KIPM Makassar. Capaian IKPA unit kerja tersebut adalah 99,29 lebih besar dari capaian Balai Besar KIPM Makassar sebesar 97,16. Selain itu, terdapat juga unit kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari yang memiliki capaian kinerja IKPA sebesar 96,19 lebih kecil dari capaian Balai Besar KIPM Makassar sebesar 97,16.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 setelah revisi sebesar Rp. 9.468.000, telah direalisasikan Rp. 9.440.000,- atau 99,70% yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan supplies komputer, perjalanan pembinaan keuangan, dan perjalanan konsultasi perpajakan;

Jika dibandingkan pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- dengan realisasi Rp. 13.168.000,- atau 99,76%.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN

Akar masalah

1. Capaian Output pada aplikasi SAKTI belum dapat diinput disebabkan aplikasinya sedang dalam tahap pengembangan pada menu capaian output;
2. Potensi masalah yang mungkin bisa terjadi adalah turunnya nilai IKPA apabila operator kurang memonitoring pelaksanaan anggaran;
3. Terjadinya penurunan nilai IKPA triwulan III 2024 sebesar 1,39% dari triwulan II 2024;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Terjadinya penurunan di pelaksanaan anggaran belanja kontraktual dilakukan pada akhir tahun anggaran karena belanja modal yang diadakan merupakan produk impor sehingga memerlukan persetujuan dari Biro Umum dan PBJ Sekjen KKP. Persetujuan pengadaan barang produk impor diperoleh pada tanggal 13 November 2024 sesuai Surat Sekjen KKP No : B.1331/SJ/PL.420/XI/2024.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 26 Januari 2024 dilaksanakan briefing pagi yang salah satu substansi penyampaiannya adalah operasional capaian IKPA;
2. Telah melakukan komunikasi dengan KPPN Mitra dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI pada tanggal 22 April 2024 sekaligus mengikuti sosialisasi pengisian capaian output. Hasil dari komunikasi itu adalah telah terealisasinya capaian output Triwulan I tahun 2024 dengan nilai sempurna atau 100
3. Mengikuti Treasury Award KPPN Makassar II semester I 2024 pada tanggal 25 september 2024.
4. Sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 di KPPN Makassar pada tanggal 4 oktober 2024

Rekomendasi rencana aksi

Mempercepat kontrak barang dan jasa pada triwulan I tahun anggaran 2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KANTORAN WALI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEUANGAN NASAL, PERSAMAAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Unit: Rp. (Miliar)

No	Kode UPT	Kode SK	Kode Sub	Kode Akun	Keterangan	Profil Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Rata-Rata	Rendahnya Risiko	Efisiensi UPT (Penghematan)	Rata-Rata Rasio Transaksi/Unit/Anak
						Rencana 2024	Rencana Revisi 2024	Persentase Anggaran	Saldo Realisasi	Persentase Tergapit	Persentase LP dan TSP	Kualitas Hasil				
1	100	100	100	100	BALAI BESAR KANTORAN WALI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEUANGAN NASAL, PERSAMAAN MAKASSAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					BALAI BESAR KANTORAN WALI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEUANGAN NASAL, PERSAMAAN MAKASSAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					BALAI BESAR KANTORAN WALI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEUANGAN NASAL, PERSAMAAN MAKASSAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

IK 11. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Salah Ditemukan	Indikator Kinerja	Kategori Tahun 2023 - 2024					Tahun 2024					Rata-Rata Skor 2023 - 2024	
		2023	2023	2023	2023	2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Rata-Rata Tahun 2024	Rata-Rata Tahun 2024	Rata-Rata Tahun 2024	Tahun 2024	Rata-Rata Tahun 2024
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah

disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2023;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :

No.	Uraian Temuan	Nilai (Rp.)
1	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	6.770.700
2	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu	5.280.000
3	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum	5.040.000
	Jumlah	17.090.700

Sesuai surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.1245/BKIPM.1/HP.520/IV/2024 tanggal 2 April 2024 Hal Tanggapan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI, maka telah dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI tersebut, yakni dengan melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RROBMS Tanggal 23 April 2024
2	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023CIFK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VPi9CBJ2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned}
 \% P &= (A/B) \times 100\% \\
 &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada tahun 2024, untuk mendukung kegiatan dialokasikan anggaran semula Rp. 11.644.000,- yang direvisi menjadi Rp.4.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	8.044.000	1.042.000
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer supplies	3.600.000	3.228.000
Jumlah		11.644.000	4.270.000

Pada tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.270.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.262.500,- atau 99,82% yang digunakan untuk penjiwaan dan penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 3.220.500,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	1.042.000	1.042.000	0,00
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer supplies	3.228.000	3.220.500	99,77
Jumlah		4.270.000	4.262.500	99,82

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 16.400.000,- yang direvisi menjadi Rp. 11.600.000,- dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp. 11.599.584,- atau 99,99%. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi sebesar 0,17% pada periode yang sama tahun 2024;

Akar masalah

- Pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Perbedaan pemahaman dalam implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pembayaran adalah telah dilakukan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah di-PDF-kan secara berkala;
- Meningkatkan pemahaman dan kecermatan verifikator keuangan dan pengelola anggaran melalui sharing session "Penatausahaan Tagihan Pembayaran Belanja" dengan nara sumber PPK dan Kepala Subbagian Umum pada tanggal 3 Mei 2024;
- Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen tagihan pembayaran belanja oleh verifikator keuangan;

IK 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Rekomendasi Tahun 2023 - 2024					Tahun 2024					Rata-rata Balai Besar KIPM Tahun 2023 - 2024	
		2023	2023	2023	2023	2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target Tahun 2024
Peningkatan dan pelaksanaan kerja pengawasan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau

evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma Nt}{\Sigma N} \times 100\%$$

ΣNt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti.

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada tahun 2024 terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP yang memberikan 4 rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 100%, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode tahun 2023 realisasi sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran Rp.822.011.000,- yang sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.709.408.509,- atau 86,30% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 11.600.000,- dan sampai akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 11.599.584,- atau sebesar 99,99%. Adapun pada tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.748.570,- atau sebesar 98,95%

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.600.000,- terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 6986,30%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini, yang semula hanya berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, menjadi belanja operasional perkantoran.

Adapun realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 dari pagu Rp. 11.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.599.584,- atau 100%, secara persentase lebih besar 23,70% dari realisasi tahun 2024.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan sdm dalam mendukung iku ini.

Akar Masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi PNBK oleh Itjen KKP berupa :
 - Surat Instruksi Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar Nomor 080/BBKIPM.MKS/TU.330/XI/ 2024 tanggal 12 November 2024 perihal

Instruksi Pengambilan Sampel Organoleptik kepada Petugas yang bertugas melakukan pengambilan Sampel Organoleptik

- Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada BPPMHKP Dengan Nara Sumber dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada Tanggal 28 November 2024
 - Memorandum Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor 081/BBKIPM.MKS/TU.210/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 Hal Penyelesaian Tindakan Perbaikan Evaluasi PNBPN
 - Reviu terhadap SOP Pelayanan Balai Besar PPMHKP Makassar sesuai dengan Notulensi HASIL REVIEW SOP SERTIFIKASI EKSPOR DAN LAYANAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN tanggal 27 November 2024
2. Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;

Rekomendasi rencana aksi

Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Audit.



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

Desain Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Periode Tahun 2020 - 2023					Tahun 2024					Rendahnya Biaya Baku (RBB) Makassar 2024 - 2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Target Tahunan 2024	Realisasi Tahunan 2024	% Realisasi terhadap Target Tahunan 2024	% Realisasi terhadap Target Tahunan 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Harian
Teknologi dan Sistem yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa UPT Balai Besar KIPM Makassar	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	76,55	70,28	80	80	84,34	105,45	105,45	-	-

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.

Perlunya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksananya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)
3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur sebagai berikut :

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah

menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 9 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 707.018.000,-
- b. Paket Swakelola sebanyak 35 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.021.375.000,-
- c. Paket Penyedia dalam swakelola sebanyak 68 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.462.789.000,-

Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP telah terealisasi = 20%;

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Sarana Pengujian Mutu senilai Rp. 691.334.000,- dan telah dilaksanakan pengadaannya melalui e-katalog dengan rincian barang sebagai berikut :

- a. Nitrogen Evaporator
- b. Irrigation Bottle
- c. Analytical Balance (Timbangan Analitik)
- d. Biological Safety Cabinet
- e. Dry Oven
- f. Autoclave
- g. Micropipette
- h. Hot Plate Stirrer
- i. Desicator
- j. Alat Pengolah Data

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini terealisasi 30%;

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah dilakukan pencatatan dan penginputan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pelaksanaan penginputan dilakukan secara berjenjang dari Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP.

Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (20 %)

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Progres pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2024 menggunakan :

1. System Digipay - Marketplace yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-20/PB.2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, dan secara teknis diatur dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022.
2. E-katalog yang merupakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 122 Tahun 2022.

Seluruh pengadaan diatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 30%.

Dengan demikian realisasi indikator Kinerja ini tahun 2024 adalah :

Unsur 1 (20%) + Unsur 2 (30%) + Unsur 3 (20%) + Unsur 4 (30%) = 100 % dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(100\%/80\%) \times 100\% = 125 \%$,

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 nilai realisasinya 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 78,26%. Hal ini disebabkan perubahan komponen yang dinilai dan pembobotan untuk mengukur tingkat kepatuhan PBJ Tahun 2024. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan nilai beberapa unsur yaitu :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)
1.	Persentase RUP telah diupload kedalam Aplikasi SIRUP	20
2.	Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE	30

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3.	Persentase laporan penyelenggaraan PBJ	20
4.	Kesesuaian tahap pelaksanaan	30
Jumlah		100

Adapun pada tahun 2024 komponen penilaian tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan nilai beberapa unsur yaitu :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan manajemen resiko PBJ strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan persiapan pengadaan	15	13,75
3	Persentase pemilihan PBJ yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian tahap pelaksanaan	45	31,83
5	Laporan penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ Lingkup BPPMHKP pada TW I s/d TW III tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

Berdasarkan evaluasi Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor surat B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dengan nilai 84,34%.

Realisasi anggaran mendukung kegiatan tahun 2022 sebesar Rp.488.710.000,- atau 95,56% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp.57.803.250,- atau 99,66% dan anggaran untuk mendukung kegiatan tahun 2024 Rp.312.298.000,- dengan realisasi sebesar Rp.306.109.981,- atau 98,2%.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 9 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar Masalah

TW 1.

- Potensi keterlambatan Pengadaan ATK dan Komputer Suplies melalui Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) karena kersediaan barang dibutuhkan pada e-katalog terbatas.
- Penyerapan anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan Pengadaan makanan/ minuman Penambah Daya Tahan Tubuh relatif rendah karena pegawai yang berhak menerima fasilitas pas pelabuhan laut/ udara dan makan/ minuman penambah daya tahan tubuh jumlahnya berkurang

TW 2.

Tingkat penyerapan anggaran masih sangat rendah yaitu pada kegiatan :

- a. Pengadaan penambah daya tahan tubuh sampai dengan Triwulan II/sampai dengan bulan Juni 2024 senilai Rp. 4.294.900,00 atau senilai 21,41% dari anggarannya sebesar Rp.20.064.000,-
- b. Operasional Pas pelabuhan Laut/Bandara sampai dengan Triwulan II/sampai dengan bulan Juni 2024 senilai Rp. 3.050.000,00 atau senilai 16,76% dari anggarannya sebesar Rp.15.150.000,-

TW 3.

Lambatnya progres penyerapan anggaran pada akun belanja modal peralatan laboratorium karena menunggu persetujuan sehubungan dengan tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan;

Terlambatnya persetujuan tentang persyaratan pembelian barang, yang mengakibatkan keterlambatan modal

TW 4.

Beberapa kegiatan yang direvisi (penambahan anggaran) pada triwulan IV banyak yang tidak terealisasi karena waktu pelaksanaan yang tidak memadai

Tindakan yang telah dilaksanakan

TW 1.

1. Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara operator komitmen dan operator persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan ke dalam aplikasi SAKTI
2. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa telah memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang/ jasa

TW 2.

1. Pada hari Rabu, 22 Mei 2024 bertempat di kantor Balai Besar KIPM Makassar Jl. Dakota No. 24, Sudiang – Makassar, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak PT. Duta Artha Perdana selaku pihak penyedia terkait penyediaan dan percepatan pengadaan barang dalam SPSE berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies.
2. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen telah mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan anggaran Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pada triwulan II telah dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

TW 3.

1. Telah melakukan revisi anggaran untuk kegiatan penambah daya tahan tubuh dan operasional pas pelabuhan/udara.
2. Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar telah bersurat ke Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2345/BBKIPM.MKS/PL.410/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk barang yang nilai TKDNnya kurang dari 25% dan Produk Impor.
3. Pada triwulan III telah dilaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Pengelola Barang/Jasa tanggal 17 September 2024 atas nama Abdul Mubarak Azis dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kompetensi LKPP Nomor: 08-00628-0924.

TW 4.

1. PPK dan PP telah menyiapkan langkah strategis pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yang Tingkat Komponen Dalam Negerinya tidak mencapai 25 %;
2. Telah melaksanakan revisi RKAKL disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Telah mengupdate SIRUP sesuai revisi RKAKL yang telah disahkan.
4. Telah menyusun dokumen pengadaan barang/jasa sesuai regulasi yang berlaku.

Rekomendasi rencana aksi

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa agar memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang.
2. Mempelajari dan mengikuti ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

Kategori	Indikator Kinerja	Tahun 2023-2024					Tahun 2024					Rata-rata BMN (%)	
		2023	2023	2023	2023	2023	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024
Pengelolaan aset milik pemerintah yang berkegiatan UPT Balai Besar KIPM Makassar	Persentase aset milik pemerintah yang berkegiatan UPT Balai Besar KIPM Makassar				100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengelolaan BMN dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,

Pengelolaan BMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan BMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013.

Evaluasi pengelolaan BMN di KKP memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- **Meningkatkan Akuntabilitas** untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah setiap tahap pengelolaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Optimalisasi Penggunaan Aset** untuk mengidentifikasi potensi penggunaan BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat membantu kementerian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi**: untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan**: Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%),
Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2023 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:

- Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.
- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.259.209.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.539.256.000,-.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.335.527.000,-.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Nilai tersebut sudah merupakan revisi penambahan anggaran belanja operasional sebesar Rp.409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 %

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar mempunyai Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Belanja Modal tersebut telah dilaksanakan 100% secara fisik pada triwulan IV, hanya saja belum dilakukan usulan penetapan statusnya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berakhir dibulan Desember 2024.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 25%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Tahun 2024 (bobot 25%).

Usulan penghapusan barang milik negara pada Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1172/KEPMEN-KP/PL.750/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Usulan penghapusan ini merupakan barang milik negara yang telah diserahkan ke Badan Karantina Indonesia.

Dengan demikian, IKU ini terealisasi sebesar 25%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

Pada Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah selesai melaksanakan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.689.238.038 dari pagu anggaran senilai Rp. 691.334.000,-. Dari hasil pengadaan tersebut penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian telah dilaksanakan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini realisasinya 25%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Pada Tahun 2024 operator modul persediaan telah menginput seluruh transaksi belanja barang persediaan dan telah di kompilasi dengan modul aset tetap sehingga terbentuk satu neraca aset lancar dan aset tetap tingkat satuan kerja. Untuk penyusunan/penyampaian laporan BMN tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2024 unaudited akan dilaksanakan pada Januari 2025 Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini realisasinya 12,5%

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Realisasi Indikator Kinerja ini tahun 2024 adalah :

Unsur 1 (12,5%) + Unsur 2 (25%) + Unsur 3 (25%) + Unsur 4 (25%) + Unsur 5 (12,5%)
= 100 % dari target 80%.

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(100\%/80\%) \times 100\% = 125 \%$.

Berdasarkan evaluasi Sekretariat BPPMHK nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024 tingkat kepatuhannya 97,50%

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 11.266.994.000,- (*sebelas milyar dua ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	8.182.000	8.172.000	10.000	99,88
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.575.000	12.538.000	37.000	99,88
3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	22.758.000	22.748.660	9.340	99,96
4	Layanan Umum	15.645.000	15.548.760	106.240	99,35
5	Layanan dan Informasi	26.099.000	26.089.199	9.801	99,99
6	Layanan Pertambangan	11.051.329.000	10.826.838.925	224.490.075	97,97
7	Layanan Manajemen SDM	88.554.000	86.287.485	2.266.515	97,52
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.189.000	79.998.804	190.196	99,88
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.270.000	4.262.500	7.500	99,82
10	Layanan Manajemen Keuangan	9.468.000	9.440.000	28.000	99,70
TOTAL		11.266.994.000	11.041.966.283	225.027.717	98,00

Adapun pagu anggaran untuk mendukung kegiatan di tahun 2022 sebesar Rp.32.979.000,- dengan realisasi sebesar Rp.32.951.400,- atau 99,91%. Untuk tahun 2023 pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.29.379.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.809.500,- atau 98,06%. Sedangkan pada tahun 2024 pagu anggaran Rp.11.266.994.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.041.966.283 atau 98,00%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 9 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Madya/Pejabat Pembuat Komitmen
4. Pejabat Pengadaan,
5. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,
6. Operator SAKTI Modul Persediaan,
7. Operator SAKTI Modul GLP,
8. Pengelola BMN,
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

Akar Permasalahan

TW I

Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana tidak memahami uraian tugas sebagai tanggung jawabnya, sehingga saat ini tugas hanya dilaksanakan oleh Analis Laporan BMN.

TW II

Sebanyak 5 unit kendaraan dinas (kendaraan roda 2) tidak pernah mengajukan penggantian eksploitasi bahan bakar secara berkala, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran dan tidak meratanya nilai pemakaian bahan bakar setiap kendaraan. Ini di karenakan *odometer* kendaraan tersebut sudah tidak berfungsi.

TW III

1. Sebanyak 3 unit kendaraan roda 2 belum perpanjangan STNK.
2. Belum terlaksananya kegiatan Belanja Modal senilai Rp. 691.334.000,-.

3. Masih ada anggaran Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan) senilai Rp.4.700.000,- yang terdiri dari Pas Kendaraan Rp.1.400.000,- dan Pas Orang Rp.3.300.000,-
4. Kurang diberdayakannya Pengelola BMN dan Pengadmintrasi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

TW IV

Masih banyaknya anggaran yang tidak terealisasi pada kegiatan :

1. Pemeliharaan/maintenance alat laboratorium senilai Rp.36.660.980,-
2. Pemeliharaan jaringan senilai Rp.17.943.908,-
3. Tambah daya listrik Rp.66.000.000,-

Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi perencanaan anggaran kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

TW I

1. Operator modul komitmen telah melaksanakan penginputan/pendetailan barang persediaan sesuai ketentuan.
2. Pemeliharaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan meliputi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

TW II

1. Telah melaksanakan pendampingan dalam pengelola BMN dan Pengadministrasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Telah melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan halaman, pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 serta peralatan dan mesin lainnya.

TW III

1. Telah melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2, hanya saja beberapa kendaraan tidak sampai pada perbaikan odometer sehingga belum mengajukan eksploitasi bahan bakar secara berkala. Perbaikan odometer sebanyak 2 unit kendaraan belum terealisasi karena penanggungjawab kendaraan belum menyerahkan kendaraannya ke bagian pemeliharaan.
2. Telah mengupdate penanggungjawab kendaraan dinas sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.24/BBKIPM.MKS/KKP.440/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. (terlampir).
3. Mengikuti FGD Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal KKP secara luring dan daring pada tanggal 29 Juli 2024.
4. Mengikuti kegiatan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP tanggal 17 – 20 September 2024 di Bandung secara daring.

TW IV

1. Telah melaksanakan Perpanjangan STNK 3 unit kendaraan roda 2.
2. PPX dan Pejabat Pengadaan telah melaksanakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Telah melaksanakan revisi anggaran pas bandara.
4. Telah memberdayakan pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Operator Komitmen dan Operator Persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan kedalam aplikasi SAKTI.
- Menugaskan 1 (satu) orang staf sebagai operator Modul Aset Tetap dan 1 (satu) orang staf sebagai operator Modul Persediaan.
- Melaksanakan penghapusan barang milik negara yang kondisinya rusak berat.
- Melaksanakan pemusnahan sertifikat karantina ikan dan mutu yang sudah tidak berlaku/usang.



Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM 110,66 (kategori Istimewa). Dari 14 (Empat belas) IKU ada 3 (Tiga) IKU baru yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	125
2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	70	98,1
3.	Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar	70	83.10

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis (IKU 1)
2. Perlu akselerasi pelaksanaan sertifikasi SKP sesuai target yang ditetapkan (IKU2)
3. Mendorong kepada para pelaku usaha di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi (IKU3)
4. Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP No. 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP kepada Inspektur Mutu dan petugas pelayanan. (IKU4)

3. TINDAKLANJUT

Adapun rekomendasi pada triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi : Melaksanakan kegiatan sertifikasi SPDI yang merupakan pengganti sertifikasi CPiB supplier (IKU 1)
Tindaklanjuti : -
2. Rekomendasi : Menyampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota tentang Hasil Penilaian Sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene Pengawasan Mutu Domestik Pada Pasar Tradisional yang nilainya Cukup dan Kurang (IKU 2)
Tindaklanjuti : -
3. Rekomendasi : Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi awal dengan pihak UPI untuk mengantisipasi keterlambatan pengurusan SKP. (IKU 4)
Tindaklanjuti : -
4. Rekomendasi : Untuk memaksimalkan pelayanan HC Ekspor mampu beradaptasi dengan sistem aplikasi baru yaitu SIAP MUTU, maka BPPMHKP Makassar perlu

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

memastikan kesiapan petugas dan prasarana dengan sistem informasi yang baru, IKU5

Tindaklanjut :

- Telah dipastikan penggunaan aplikasi Sister Karoline versi 6.002 yang terbaru pada sistem pelayanan untuk mendukung format Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).
- Telah dilakukan perpindahan layanan dari kantor pelayanan BKIPM yang telah dialihkan ke Barantin berpindah ke kantor administrasi di kantor induk pada bulan November tahun 2024.

5. Rekomendasi : Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan (IKU7)

Tindaklanjut : -

6. Rekomendasi : Melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian UPT Asal Terkait nilai IP ASN pegawai yang masih rendah dan melakukan sharing sesuai kepegawaian pada rapat bulanan.

Tindaklanjut :

- Telah dilakukan koordinasi dengan UPT asal pegawai yang mutasi masuk yang memperoleh nilai kinerja SKP yang rendah karena belum terupdate dalam aplikasi SIASN instansi;
- Telah disampaikan kepada pegawai untuk mengikuti seminar pengembangan kompetensi serta melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id;

7. Rekomendasi : Melakukan *Refreshment* regulasi pengelolaan anggaran untuk penyelesaian temua BPK Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (IKU10)

Tindaklanjut : Mengikutkan pegawai pengelola anggaran pada pelatihan peningkatan kompetensi. Pada triwulan IV tahun 2024, upaya yang dilaksanakan

untuk meningkatkan kompetensi pengelola anggaran adalah dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas yang diemban.

8. Rekomendasi :Melaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW IV 2024. (IKU 13)

Tindaklanjut :

- Telah dilaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW 4 Tahun 2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. Adapun poin-poin rapat tersebut antara lain :
- Tindaklanjut arahan dari Sekretaris BPPMHKP terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran;
- Masih relatif banyaknya anggaran yang belum terserap di triwulan 4 sehingga perlu percepatan realisasi anggaran

9. Rekomendasi :Memberdayakan Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tindaklanjut :

1. Telah melaksanakan Perpanjangan STNK 3 unit kendaraan roda 2.
 2. PPK dan Pejabat Pengadaan telah melaksanakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 3. Telah melaksanakan revisi anggaran pas bandara.
- Telah memberdayakan pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Lampiran
Perjanjian Kinerja
Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Zamrud**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar

Mohammad Zamrud

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	99
		2	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	4
		3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	60
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	345
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	84
		6	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	1
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	18
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
SK 3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	100

		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93,76
		13	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80

Data Anggaran

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	789,300,000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	1,371,500,000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.199.890.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024		12.360.690.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Mohammad Zamrud



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Zamrud**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar

Mohammad Zamrud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET
SK 1.	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		4.	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99
SK.2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
SK.3.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	3.36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	86
		8.	Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71
		10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93,76
		11.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		14.	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	80

Data Anggaran

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.466.344.000
	Manajmene Mutu	1.144.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.857.494.000
Total Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024		13.467.838.000

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Mohammad Zamrud

Lampiran
Laporan Capaian Kinerja (LCK)
Tahun 2024

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUNAN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	0	0	70
Realisasi	0	0	125
% Capaian	0	0	178,5 %

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. - BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan. - Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :	

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOiB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOiB)

- Pada Tahun 2024 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPI Beba Takalar pada 7 unit kapal perikanan, PPI Paotere Makassar pada 1 unit kapal perikanan, PP Untia pada 1 unit kapal perikanan dan TPI Lappa Sinjal dengan 4 kapal. Dengan total 13 kapal yang diinspeksi.
- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros di Kabupaten Maros. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur mutu BPPMHKP Makassar bersama auditor CPIB dari BPBAP Takalar dan DKP Provinsi Sul -Sel. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembenihan ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03226) dengan komoditas Ikan Nila.
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan CPIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros di Kabupaten Maros. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Makassar Bersama auditor CBIB dari BPBAP Takalar dan DKP Provinsi Sulsel. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran ikan air tawar di kolam (Kode KBLI 03221) dengan komoditas ikan nila.
- Capaian Iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOiB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CDOiB
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*1

$$\frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\% = \frac{1+1+11}{12} \times 100\% = 125 \%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 13 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 11 sertifikat telah terbit pada bulan Desember 2024, sedangkan sebanyak 2 sertifikat masih dalam proses penerbitan di Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.
 - b. 1 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan November 2024
 - c. 1 Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan Desember 2024
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 133.511,000 yang digunakan untuk :
 1. Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 57.401.000
 2. Bimtek/Sosialisasi sertifikasi produksi primer Rp. 76.110.000
- Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 132.135.925 atau 98,97 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	57.401.000	56.330.500	1.070.500
2	Bimtek/Sosialisasi sertifikasi produksi primer	76.110.000	75.805.425	304.575
JUMLAH		133.511.000	132.135.925	1.375.075

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada tahun 2024 sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 Inspektur Mutu, 2 PILP dari BPPMHKP Makassar yang didukung oleh Perwakilan 4 orang PP Untia serta 1 penyuluh swadaya. Sedangkan untuk kegiatan CPIB dan CBIB telah dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Maros dengan melibatkan 3 inspektur mutu dan 1 orang fungsional umum dari BPPMHKP Makassar dan 2 orang auditor CBIB dan 2 orang auditor CPIB dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan BPBAP Takalar.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 1 – 4 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Oria Hotel Jakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPSOMKP.
2. Pada tanggal 15 – 16 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Refreshment Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu pada kegiatan sertifikasi produksi primer bidang perikanan budidaya di Santika Premiere Hotel Belitung yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP.
3. Pada tanggal 17 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti Refreshment Peningkatan Kompetensi Inspektur Mutu pada kegiatan sertifikasi bidang perikanan tangkap serta penanganan distribusi

	dan pengolahan di Santika Premiere Hotel Belitung yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP.
4.	Pada tanggal 21 – 27 Oktober 2024 Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti workshop Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bidang Produksi Primer di Lombok Astoria Hotel Mataram NTB yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
5.	Pada tanggal 04 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan.
6.	Pada tanggal 5 – 8 November 2024, Inspektur mutu BPPMHKP Makassar mengikuti workshop Sertifikasi SJMKHP bidang CPIB Kapal di Luwansa Hotel and Convention Center Manado Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
7.	Pada tanggal 18 November 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal Perikanan yang dilaksanakan di kantor Pelabuhan Perikanan Untia yang dihadiri oleh 20 orang awak kapal dari hasil kegiatan tersebut semua awak kapal yang hadir mendapatkan sertifikat Bimtek CPIB.
8.	Pada Tanggal 19 November 2024 BPPMHKP Makassar mengikuti kegiatan operasi terpadu dokumen perizinan kapal perikanan berkolaborasi dengan pelabuhan perikanan UNTIA, PSDKP Satwas Makassar, Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi pemilik kapal perikanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan berusaha, meningkatkan pemahaman terhadap cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal serta pemenuhan buku Kesehatan kapal.
9.	Pada tanggal 16 Desember 2024 Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal Perikanan yang dilaksanakan di TPI Lappa Sinjai yang dihadiri oleh 55 orang awak kapal. dari hasil kegiatan tersebut semua awak kapal yang hadir mendapatkan sertifikat Bimtek CPIB.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan PP Untia DJPT terkait akselerasi sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q1 Tahun 2025

I. Daftar Sertifikasi CPIB Kapal di Tahun 2024

No	Nama Kapal Perikanan	Produk	Grade	Nomor Sertifikat
1.	KM. Sinar Madina AN	Kakap, jenaha, kurisi	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240004, Tanggal 02 Desember 2024
2.	KM. Akbar Jaya 3	Kakap, kurisi	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240005, Tanggal 02 Desember 2024
3.	KM. Magfirah 07	Tongkol, layang	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240003, Tanggal 02 Desember 2024
4.	KM. Tasniyah Jaya	Kakap merah, lamuru, katamba, kerapu, kaneke, ekor kuning	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240014, Tanggal 05 Desember 2024

5	KM. Iksaryadi Jaya	Kerapu, katambak, lamuru, kakap merah, ekor kuning	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240015, Tanggal 05 Desember 2024
6	KM. Minasa Makka FR	Kerapu, Kakap, Katambak, Lamuru	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240021, Tanggal 09 Desember 2024
7	KM. Nur Ratu Indah 01	Kembung	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240026, Tanggal 17 Desember 2024
8	KM. Sinar Madina ERN	Katamba, kakap merah, kaneke, tenggiri, bubara, kerapu	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240030, Tanggal 19 Desember 2024
9	KM. Arlan	Kerapu, katambak, ekor kuning, kakap	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240059, Tanggal 30 Desember 2024
10	KM. Portuna 01	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240044, tanggal 27 Des 2024 - 27 Des 2026
11	KM. Dirgantara	Yellowfin Tuna	B	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240045, tanggal 27 Des 2024 - 27 Des 2026
12	KM. Fauzan 01	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240064, Tanggal 30 Desember 2024
13	KM. Aisah 39	Yellowfin Tuna	C	NOMOR : ID - CPIB - K - 73 -240065, Tanggal 30 Desember 2024

II. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CPIB di Tahun 2024

No	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	SMK Negeri 1 Maros	Berih Nila	C	ID: CPIB - T - 73 - 24000 - 3, Tanggal 25 November 2024

III. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB di Tahun 2024

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	SMK Negeri 1 Maros	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	B	ID: CBIB - T - 73 - 240017, Tanggal 23 Desember 2024

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS CPIB KAPAL DI PELABUHAN PERIKANAN UNTIA 18 NOVEMBER 2024





**DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS CPIB KAPAL
DI PELABUHAN PPI LAPPA SINJAI
18 DESEMBER 2024**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI KAPAL PERIKANAN TAHUN 2024**





**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
TAHUN 2024**



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
TAHUN 2024



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 2	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	0	0	70
Realisasi	0	0	114,2
% Capaian	0	0	163,1

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIKMP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu.

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen melaksanakan sertifikasi kelayakan pengolahan, sertifikasi HACCP dan sertifikasi pengelolaan distribusi ikan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pasca panen di atas, diakomodir dalam Indikator Kinerja Utama Nomor 2 yaitu "Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)", berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar yang ditandatangani di Bulan Oktober 2024 (Triwulan IV 2024).

Pada triwulan sebelumnya (Triwulan I-III 2024), kegiatan tersebut di atas dipisahkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)
3. Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit)

Indikator Kinerja ini mendukung kegiatan prioritas kedua KKP yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga KKP yaitu pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap yang di terima oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui sertifikasi HACCP, Official Control dan Traceability yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan. Produk hasil perikanan Indonesia menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang semakin kompleks diantaranya; ketatnya persyaratan jaminan mutu (quality) dan keamanan (safety) pangan, kemampuan telusur (traceability), ramah lingkungan (environmental friendly) dan keberlanjutan (sustainability). Untuk itu diperlukan upaya tindakan penguatan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIMKHP) mulai dari hulu sampai hilir. Agar traceability dapat diterapkan secara konsisten, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai suplai dan produksi harus melakukan pencatatan (informasi dan koleksi data) tentang hal-hal yang telah ditentukan terhadap input produksi atau produk yang dikelolanya.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi HACCP, Official Control dan Traceability yang merupakan persyaratan utama ekspor produk perikanan ke negara tujuan.

CARA PENGUKURAN

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$\%X = \frac{A-B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menstapikan GMPSSOP
xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Pada tahun 2024, realisasi sertifikasi HACCP sebanyak 392 sertifikat dari target 345 sertifikat. Sedangkan realisasi sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) tahun 2024 sebanyak 78 sertifikat dari total rekomendasi teknis sebanyak 68 laporan dari Ditjen PDSPKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi SKP tersebut terhitung sejak tanggal 10 Oktober hingga 31 Desember 2024. Dengan demikian persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk (A) adalah :

$$A = \frac{392}{345} \times 100\% = 113,6\%$$

$$B = \frac{78}{68} \times 100\% = 114,7\%$$

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{113,6 - 114,7}{2} \\ &= 114,2\% \end{aligned}$$

- Realisasi kegiatan sertifikasi HACCP sebesar 114,2 %, dari target 70 %.
Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar sebesar 163,1 %

Realisasi ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena satuan target berbeda. Pada tahun 2023 menggunakan satuan target jumlah ruang lingkup HACCP sedangkan pada tahun 2024 menggunakan satuan target persentase.

- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 22 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan

Kegiatan pendukung

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran d/s TW II 2024	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran TW II 2024	Persentase Realisasi	Isa Anggaran
I	Inspeksi HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Monitoring dan Evaluasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 120.000.000,-	Rp. 120.000.000,-	Rp. 119.412.978,-	99,50%	Rp. 109.200.830,-	91,84%	Rp. 127.011,-
II	Surveilans Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 108.100.000,-	Rp. 108.100.000,-	Rp. 108.172.111,-	99,99%	Rp. 102.994.101,-	97,99%	Rp. 107.778,-
III	Verifikasi Penerapan Sistem Traceability di Unit Pengolahan Ikan	Rp. 210.000.000,-	Rp. 48.000.000,-	Rp. 47.993.268,-	99,99%	Rp. 9.846.000,-	20,70%	Rp. 36.791,-
	TOTAL	Rp. 357.100.000,-	Rp. 286.176.848,-	Rp. 285.585.000,-	100,46%	Rp. 217.144.111,-	100,40%	Rp. 221.581,-

IKU 2 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), sebelumnya merupakan IKU 4 dengan nama IKU yaitu Sertifikat Hazard Analysis Critical control point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yaitu Traceability dan Surveilans HACCP (Official Control) sebelumnya merupakan IKU yang berdiri sendiri.

Kegiatan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk) Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,55 %. Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 yang mencapai 99,50% maka realisasi tersebut hampir sama.

Kegiatan Surveilans Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,90 % Realisasi ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena bukan merupakan IKU di tahun 2023.

Kegiatan Verifikasi Penerapan Sistem Traceability di Unit Pengolahan Ikan Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,92 % Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 yang mencapai 99,63% maka realisasi tersebut hampir sama

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Terdapat kegiatan pasca panen yaitu Sertifikasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024, dan perlu diakselerasi pada tahun 2025

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 07 Oktober 2024 telah dilaksanakan diseminasi hasil pelatihan SJMHKP di ruang rapat Balai Besar KIPM Makassar oleh inspektur mutu yang telah mengikuti pelatihan di Hotel Dria Jakarta. Tujuan kegiatan

diseminas tersebut adalah meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada kegiatan sertifikasi hulu hilir.

2. Pada tanggal 28 – 30 Oktober tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan Traceability terhadap inspektur mutu di seluruh UPT BPPHKP dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Inspektur Mutu dari BPPMHKP dan 3 orang dari UPI Jakarta bertempat di hotel Grand Cokro Jakarta.
3. Pada tanggal 04 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan.
4. Pada tanggal 24 – 26 Nopember 2024 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Verifikator SKP di Hotel Arion Suites Bandung diikuti oleh Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP.
5. Pada tanggal 10 Desember 2024 dilaksanakan Indonesian Marine and Fisheries Business Forum 2024 bertempat di Hotel Raffles, Jakarta yang diikuti oleh 2 orang Inspektur mutu BPPMHKP Makassar. Kegiatan ini bertemakan Blue Food Competent Authority Dialogue yang bertujuan untuk mendorong geliat investasi biru di Sektor Kelautan Perikanan dan sebagai sarana pertukaran informasi serta memperkuat hubungan baik dengan otoritas kompeten negara tujuan ekspor.
6. Pada tanggal 23 Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) bertempat di Hotel Harper Makassar yang diikuti oleh 100 orang pelaku usaha ekspor. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang ketentuan regulasi serta dapat menyederhanakan bisnis proses penerbitan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung jawab	Periode
Perlu akselerasi pelaksanaan sertifikasi SKP sesuai target yang ditetapkan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Tahun 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP UPI DI CV. NAJWA BAHARI Tahun 2024





**KEGIATAN VERIFIKASI TRACEABILITY
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN PT. SIRIMAN JAYA ABADI TAHUN 2024**



**DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SURVAILEN KONSISTENSI PENERAPAN HACCP UPI DI CV. MINA MAJU
SEJAHTERA Tahun 2024**





Dokumentasi Diseminasi Hasil Pelatihan SJMHKP di BPPMHKP Makassar
Pada tanggal 07 Oktober 2024



**Dokumentasi Rapat Koordinasi SJMHKP Hulu Hilir di BPPMHKP Makassar
Pada tanggal 04 Oktober 2024**



**Dokumentasi In House Training Traceability
tanggal 28 – 30 Oktober 2024**



**Dokumentasi BPPMHKP Makassar Mengikuti Indonesia Marine And Fisheries Business forum
tanggal 10 Desember 2024**



Dokumentasi Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
tanggal 23 Desember 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 3	:	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	4	4	70
Realisasi	4	4	100
% Capaian	100	100	142

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat, penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang masuk ke sentra penyedia pangan sehat seperti pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyajian sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sentra penyedia pangan sehat.

Pada triwulan I, II dan III satuan target masih menggunakan jumlah lokasi sedangkan pada triwulan IV tahun 2024 terjadi perubahan satuan target dari 4 lokasi menjadi 70% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan IV yang ditandatangani di bulan Oktober 2024. Indikator kinerja utama berubah dari "penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)" menjadi "persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)". Adanya perubahan satuan target dari 4 lokasi menjadi 70% menyebabkan perubahan formula yang sebelumnya menggunakan formula "jumlah lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik" menjadi "persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI". Adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\% X = A/B \times 100\%$$

A = Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan hasil KP di wilayah RI

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yaitu :

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern lotte mart Panakkukang, pasar modern Lotte Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.

2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yang sama.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 dari target 4 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik telah terealisasi 4 lokasi dengan 11 titik pengawasan yaitu:

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar tradisional Sentral, pasar modern Lottemart Alauddin, pasar modern Hypermart Panakkukang, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 1 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa.
3. Kabupaten Takalar sebanyak 1 titik yaitu PPI Beba.
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 1 titik pengawasan yaitu pasar sentral Pinrang.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) di tahun 2024 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, Manager Pasar Modern, PPI/TPI.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional, pasar modern dan TPI/PPI serta mengisi check list Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya, dengan target pengujian yaitu organoleptik, Angka Lempeng Total (ALT), *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin.

Pada Tahun 2024 dari target 4 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik telah terealisasi 4 lokasi, sebanyak 14 titik pengawasan yaitu

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik lokus yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern Lottemart Panakkukang, pasar modern Lotta Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik lokus yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang.
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik lokus yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik lokus pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya
2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan
3. Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tabel 1. Kegiatan Utama dan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Utama dan Pendukung	Anggaran TA 2024	Realisasi Tw IV TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Utama)	60.000.000	57.235.865	95.39	2.764.135
2	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya (Pendukung)	80.000.000	78.603.744	98.25	1.396.256
3	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan (Pendukung)	13.070.000	13.070.000	100	0
4	Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (Pendukung)	288.656.000	285.590.425	98.96	2.995.575
Jumlah		441.726.000	434.500.034	98.36	7.225.966

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada sampel uji di 14 (empat belas) titik pengawasan selama tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. Triwilan 1 Kab. Gowa dan Kab. Takalar menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan.

2. Triwulan II Kota Makassar dan Kab. Pinrang menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan;
3. Triwulan III Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Pinrang dengan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan;
4. Triwulan IV Kota Makassar dengan hasil pengujian mikrobiologi dan kimia memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk pengujian organoleptik terdapat 15 sampel dengan lokasi yang berbeda menunjukkan hasil uji dibawah standar persyaratan mutu (minimal 7).

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 terdapat sampel triwulan II dengan hasil pengujian sampel Kab. Takalar titik pengawasan PPI Beba sampel cumi-cumi segar (*cephalopods*) ditemukan hasil pengujian coliform dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 7,4 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g dan titik pengawasan Pasar Sentral Takalar dengan sampel bandeng segar ditemukan hasil pengujian coliform dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 3,6 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g. Untuk hasil uji beberapa sampel lainnya memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan;

Pada tahun 2022 terdapat sampel triwulan II dengan hasil pengujian untuk sampel *cephalopod* (cumi-cumi segar) dari lokasi Kota Makassar titik pengawasan pasar tradisional Terong ditemukan hasil pengujian formalin diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan 0 ppm, hasil uji 1,1 ppm) sedangkan hasil pengujian sampel dari beberapa titik lainnya memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000 dengan persentase capaian sebesar 95,39%, (Rp. 57.235.065)

Sebagai perbandingan anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp. 78.342.000, dengan persentase capaian sebesar 99,53% (Rp. 77.977.352).

Pada tahun 2022 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 78.437.513 dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.448.000 dengan persentase capaian sebesar 99,99%.

Pagu Anggaran kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya tahun 2024 sebesar Rp. 80.000.000 dengan persentase capaian sebesar 98,25% (Rp. 78.603.744).

Pagu anggaran Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan sebesar Rp. 13.070.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran Masyarakat yang meningkat pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar Rp. 288.656.000 dengan persentase capaian sebesar 98,96% (Rp. 285.590.425)

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2024 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 12 orang dari Dinas Perikanan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 2 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Sebagai Perbandingan jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2023 yaitu inspektur mutu sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 15 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 3 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Adapun untuk tahun 2022, jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik yaitu inspektur mutu sebanyak 19 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 11 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Tw I, Hasil Penilaian terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hygiene di sentra penyedia pangan sehat (pasar tradisional belang-balang dan pasar sentral Takalar) menunjukkan kondisi **Cukup**. Sementara untuk penyedia sentra pangan yang lain menunjukkan kondisi **Baik**.
2. Tw II, Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada TW II (seharusnya dilakukan kegiatan pada bulan april, namun baru terlaksana pada bulan Mei 2024). Hal ini

disebabkan karena inspektur mutu sebagai pelaksana kegiatan tidak konsisten dalam mentaati jadwal yang telah ditetapkan.

3. Tw III, Kondisi sarana dan prasarana serta pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dikonsumsi khususnya di pasar tradisional dan PPI/TPI masih kurang hal ini ditemukan secara berulang-ulang dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.
4. Tw IV Potensi masalah: pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi serta pentingnya menjaga sanitasi masih kurang, sehingga akan memicu munculnya kontaminasi bakteri patogen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

- TW I:- Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 yaitu sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi pada tanggal 16 februari 2024 dan melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 2 lokasi yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
- TW II:- Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu telah menyampaikan pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, melalui surat penyampaian nomor B. 1.187/BKIPM.MKS/TU.140/V/2024 dan B. 1.188/BKIPM.MKS/TU.140/V/2024 perihal pemberitahuan hasil penilaian sarana prasarana pengawasan mutu domestik.
- TW III :-Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan III tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang.
 - Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa'Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1909/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
 - Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan Kabupaten Pinrang terhadap pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya yang nilainya CUKUP pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1910/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
 - Mengikuti Kegiatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik Pada tanggal 3 - 5 Juli 2024 bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan
- TW IV: - Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan IV tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Kota Makassar dengan 8 titik pengawasan.
 - Mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik pada tanggal 31 Oktober - 1 Nopember 2024 di Hotel Harper Yogyakarta.
 - Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa'Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Nopember 2024 dengan nomor surat B. 2817/BBKIPM.MKS/TU.140/XI/2024.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Rekomendasi rencana aksi di tahun 2025 yaitu: 1. Melakukan koordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir. 2. Mendorong kepada para pelaku usaha di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2024

- a. Rapat Koordinasi dengan instansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik terkait 16 Februari 2024:



- b. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2024 di Pasar Minasa Maupa dan Pasar Balang-Balang Kab. Gowa



C. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan II Tahun 2024 Kota Makassar



- d. Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Kabupaten Pinrang Tw II



- e. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan III Tahun 2024 di Kabupaten Gowa



- f. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan III Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang



- g. Edukasi dan penyadartahuan tentang ikan sehat bermutu kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang



- h. Mengikuti kegiatan peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik Surabaya



I. Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di Kabupaten Takalar Tw III



J. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan IV Tahun 2024 di Kota Makassar

TPI Rajawali



Pasar Daya



Lottemart Panakkukang



Rangkaian kegiatan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar



Kegiatan pembagian nasi ikan di Balai Besar KIPM Makassar dilakukan pada panti asuhan di kota Makassar sebanyak 200 paket



Peningkatan kompetensi sdm pengawasan mutu dan hasil perikanan domestik tanggal 31 Oktober – 1 November 2024



Kegiatan Pendataan Ketersediaan Stok Ikan dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama IKU 4	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

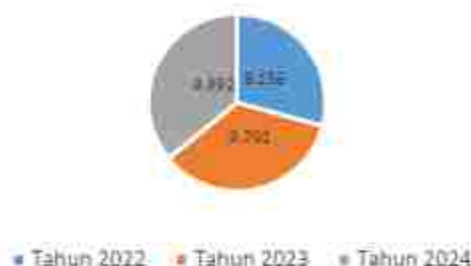
T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	99	99	99
Realisasi	100	100	100
% capaian	101%	101%	101%

Catatan :

Tahunan : = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik; - Indikator kinerja mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua yaitu meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan tangkap melalui penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga yaitu mendukung peningkatan produksi lima komoditas ekspor yaitu udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Di Sulawesi Selatan terdapat dua komoditas budidaya yaitu udang dan rumput laut yang dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor ke negara tujuan; - Badan Mutu KKP Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Badan Mutu KKP Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor; - Pada Tahun 2024 didapatkan total volume ekspor komoditi hasil perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 201.002 Ton senilai 9.014 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 9.992 sertifikat, sedang di Tahun 2023 didapatkan jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan sebanyak 9.701 sertifikat, didapatkan peningkatan jumlah sertifikat sebesar 3,0 %;

Perbandingan Jumlah Sertifikat Ekspor Mutu (HC) Yang Memenuhi Persyaratan



- Indikator Kinerja efektifitas ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor.
- Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

dimana :

A : Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan - penolakan oleh negara tujuan x 100%
Jumlah HC karantina ekspor yang terbit

Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi. Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan

Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan x 100%
Jumlah HC mutu ekspor yang terbit

$$= \frac{9.992 - 0}{9.992} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

- Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, dari Triwulan I hingga Triwulan IV didapatkan realisasi sama yaitu 100 % dikarenakan tidak adanya kasus penolakan oleh negara tujuan.
- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 19 orang dan didukung oleh tenaga PPNPN sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Rp. Anggaran Awal	Rp. Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran s.d. TW IV 2024	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran TW IV 2024	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran TW IV 2024
1	2024-RP-001.001.a Sertifikasi CPB pada supplier/supplier perikanan	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.436.000,-	99,80%	Rp. 32.436.000,-	99,80%	Rp. 64.000,-
2	2024-RP-001.001.c Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	100%	Rp. 7.500.000,-	100%	0
3	2024-RP-001.002 Produk perikanan yang berasal dari ikan ekspor impor	Rp. 57.841.000,-	Rp. 57.841.000,-	Rp. 56.841.000,-	98,29%	Rp. 56.841.000,-	98,29%	Rp. 100.000,-
	TOTAL		Rp. 97.841.000,-	Rp. 96.841.000,-	98,17%	Rp. 96.841.000,-	98,17%	Rp. 164.000,-

Perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak bisa diukur disebabkan oleh perbedaan kegiatan pendukung IKU. Pada Tahun 2023 tiap kegiatan terakomodir pada masing-masing IKU, sedang pada Tahun 2024 beberapa kegiatan tergabung dalam 1 (satu) IKU sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan jumlah realisasi anggaran.

Sertifikasi CPB pada unit pemasok produk perikanan pada tahun 2024 berdasarkan jumlah unit pemasok, didapatkan realisasi sebanyak 11 (sebelas) unit pemasok dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- realisasi sebesar Rp. 32.436.000,- atau 99,80 %, sedangkan anggaran kegiatan Bimbingan Teknis CPB pada supplier pada TW IV Tahun 2024 mengalami realokasi anggaran ke kegiatan surveilan pengendalian mutu pasca panen sehingga ditiadakan penyelenggaraannya. Terdapat perbedaan satuan target antara kegiatan CPB Tahun 2023 dan Tahun 2024, yaitu pada Tahun 2023 target capaian berdasarkan jumlah sertifikat yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat, sedangkan Tahun 2024 target capaian berdasarkan jumlah unit pemasok, sehingga realisasi pelaksanaan tidak bisa dibandingkan.

Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra pada Tahun 2024 sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar 73,35 % hingga Triwulan III, dan pada TW IV 2024 sisa anggaran Rp. 1.999.000 dialihkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPI dan terealisasi 100%.

Kegiatan investigasi kasus penahanan/penolakan produk perikanan pada Tahun 2024 didapatkan tidak adanya kasus penahanan/ penolakan pada negara tujuan sehingga keberterimaan produk perikanan adalah 100% Anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan IV 2024 dialihkan ke kegiatan surveilan HACCP dan didapatkan realisasi sebesar 99,44%.

Dengan demikian total realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 56.841.000,- atau 99,72 %

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Tahun 2024 potensi masalah berfokus pada proses penerbitan sertifikat HC Mutu Ekspor, masalah dapat terjadi jika :
 - a. petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC);
 - b. Petugas pelayanan dalam melakukan penerbitan maupun pemberian stempel pada lembaran HC sehingga kemungkinan akan adanya penolakan atau pengembalian lembaran HC dari otoritas kompeten pada negara tujuan;
 - c. Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu dalam pelaksanaan kegiatan surveilan konsistensi penerapan HACCP pada Unit Pengolah Ikan dalam melakukan penilaian organoleptik lapangan kurang akurat sehingga nilai organoleptik produk yang didapatkan tidak tepat.
- Pada Tahun 2025 kegiatan sertifikasi CPB (Cara Penanganan dan Pengolahan Yang Baik) pada unit pemasok akan berubah menjadi SPDI (Sertifikat Pendistribusian Ikan), sehingga diperlukan sosialisasi ke Inspektur Mutu, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan akan adanya perubahan sistem proses penerbitan sertifikasi tersebut.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait ketentuan negara tujuan ekspor pada tanggal 29 Januari 2024;
- Telah dilaksanakan Sharing Session dengan Inspektur Mutu terkait peningkatan kompetensi Inspektur mutu dalam pelaksanaan SJMKHP pada tanggal 20 Mei 2024 guna meningkatkan kompetensi petugas verifikasi;
- Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 20 Juni 2024 guna meminimalisir terjadinya gratifikasi pada pelaksanaan SJMKHP;
- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat;
- Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Panelis Terlatih Pengujian Organoleptik Sensori yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu pada tanggal 26 September 2024 guna meningkatkan kompetensi petugas pengendalian mutu;
- Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik sebelum penerbitan sertifikat;
- Agar tidak terjadinya kasus penolakan ataupun pengembalian lembar Health Certificate dari otoritas negara tujuan maka dilakukan pemeliharaan perangkat peralatan penerbitan HC
- Telah dilakukan sosialisasi perubahan system proses penerbitan sertifikasi penjaminan mutu kepada seluruh stakeholder terkait, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan beralokasi di Sulawesi Selatan, adapun kegiatan yang telah diadakan yaitu :
 - a. Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan pada tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan sebanyak 40 orang. Pada kegiatan tersebut disampaikan kebijakan SJMKHP dan persyaratan ekspor ke negara mitra/negara tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan;
 - b. Sosialisasi penerbitan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan oleh PLT. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP Ibu Tri Handayani pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar dan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu;
 - c. Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan pada tanggal 04 November 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta memberikan pemahaman dan persepsi yang seragam antar instansi terkait dan pemangku kebijakan;
 - d. Telah mengikuti workshop kasus penolakan/penahanan produk perikanan pada tanggal 4-6 Desember 2024 bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen, workshop ini bertujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI dinegara tujuan baik masalah teknis dan non teknis serta menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari Inspektur Mutu BPPMHKP se Indonesia, penanggung jawab mutu di UPI serta instansi terkait;
 - e. Sosialisasi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2024 bertempat di Hotel Harper Makassar yang dihadiri oleh stakeholder, unit pemasok dan Unit Pengolah Ikan. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Permen Kp Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang akan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2025;

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
a. Melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Kepala BPPMHKP No. 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP kepada Inspektur Mutu dan petugas pelayanan.	Ka. Timja Pengendalian Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	Triwulan I 2025
b. Melakukan koordinasi dengan tim pengelola anggaran terkait dengan blokir anggaran pada kegiatan yang mendukung IKU tersebut.		



DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Ekspor di Negara Tujuan pada tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar



2. Sosialisasi penerbitan sertifikasi oleh PLT. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP Ibu Tri Handayani pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar



3. Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu Hilir di Sulawesi Selatan pada tanggal 04 November 2024 bertempat di Hotel Dalton Makassar



4. Workshop kasus penolakan/penahanan produk perikanan pada tanggal 4-6 Desember 2024 bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta



5. Sosialisasi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2024 bertempat di Hotel Harper Makassar



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terseleenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 5	:	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun			Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	2022	2023	2024		
Target	-	-	70		
Realisasi	-	-	83,10	88,15	70
% Capaian	-	-	118,71		

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. - ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium-pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: - Ruang Lingkup - Acuan Normatif - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumber Daya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen - ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Nilai kualitas penerapan (ISO/IEC 17020) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumberdaya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen	
Berdasarkan Surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor 8.32/BPPMHKP.2/TU.210/1/2025 tanggal 10 Januari 2025, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah sebesar 81,35. Untuk nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah sebesar 84,85.	

Untuk menghitung nilai IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi, maka digunakan rumus :

$$\%X = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

Dimana :

%X = Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Jika nilai penerapan ISO 17020 dan ISO 17025 berdasarkan hasil audit internal dan eksternal dimasukkan dalam rumus, maka diperoleh :

$$\%X = \frac{84,85\% + 81,35\%}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 83,10 \%$$

Nilai ini masih memenuhi target IKU sebesar 70%.

IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi ini merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga belum dapat dibandingkan dengan nilai IKU pada tahun-tahun sebelumnya.

Sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan ini adalah sebanyak 22 orang inspektur mutu yang melaksanakan inspeksi dan surveilan ke Unit Pengolahan Ikan untuk penerapan SNI ISO/IEC 17020 dan juga melaksanakan pengujian laboratorium untuk penerapan SNI ISO/IEC 17025.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga inspeksi memerlukan komitmen dan konsistensi lembaga dalam penerapannya. Untuk itu perbaikan secara terus menerus perlu dilaksanakan agar standar penerapan ISO 17020 dan ISO 17025 dapat terus berjalan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Balai Besar KIPM Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir di Sulawesi Selatan terus menerapkan ISO 17020 dan ISO 17025 secara konsisten. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai kegiatan penerapan ISO diantaranya Kaji Ulang Manajemen, Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal, Peningkatan kompetensi personil, dsb. Temuan-temuan audit internal dan eksternal terus dilakukan perbaikan agar peningkatan secara berkelanjutan dapat dipertahankan di Balai Besar KIPM Makassar.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mempertahankan status akreditasi pada penerapan system manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2015	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji	Tahun 2025

**DOKUMENTASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
PADA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**



Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium untuk Pengujian
Bidang Kimia Parameter Logam Berat dan Histamin pada tanggal 2 – 5 Desember 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terseleenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama IKU 6	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	Tahun			Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	2022	2023	2024		
Target	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Realisasi	89,80	91,12	94,20	90,12	90,12
% Capaian	106,9	107,28	112,1	107,28	107,28

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuASAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BIKPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :

1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Impor**)
3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)*
4. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$n = \frac{Z^2 \cdot NP(1-P)}{d^2}$$

X = Nilai chi square tabel = 3,841
 dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0,05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (jika tidak diketahui maka P = 0,5)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$n = \frac{3,841^2 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \times 47} = 42,796 \approx 43$$

Selama tahun 2024, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan jumlah responden sebagai berikut :

Triwulan	Jumlah Layanan	Jumlah Minimal Responden	Jumlah Responden	Keterangan
I	2.444	335	257	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan perbaikan dengan penunjukan customer service pelayanan
II	2.156	327	207	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan perbaikan dengan mengoptimalkan monitoring pengisian SKM
III	2.603	338	674	Jumlah responden telah mencukupi
IV	2.845	341	404	Jumlah responden telah mencukupi

Dari jumlah responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat bahwa pada Triwulan I dan II jumlah responden belum mencukupi jumlah minimal responden sesuai dengan Formula Isaac & Michael. Namun dengan perbaikan terus menerus maka jumlah responden telah dapat ditingkatkan pada Triwulan III dan IV dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{9}{9} = 1 = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Jika dilihat berdasarkan nilai per unsur, maka nilai IKM Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Kesesuaian persyaratan	3,716	3,725	3,734	3,750
2.	Kemudahan prosedur	3,603	3,681	3,709	3,757
3.	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,623	3,700	3,706	3,755
4.	Kesesuaian biaya	3,704	3,696	3,739	3,787
5.	Kesesuaian produk	3,712	3,686	3,715	3,755

6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,626	3,691	3,705	3,738
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,588	3,643	3,690	3,775
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,689	3,792	3,769	3,812
9.	Kualitas isi/konten	3,716	3,700	3,731	3,785
	Nilai IKM	91,60	92,54	93,05	94,20

Dari nilai IKM yang dilaksanakan selama 4 kali pada tahun 2024, dapat terlihat bahwa nilai IKM secara konsisten terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan terus menerus mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk dua tahun terakhir, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat terlihat pada tabel berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		
		2022	2023	2024
1.	Kesesuaian persyaratan	3,55	3,680	3,750
2.	Kemudahan prosedur	3,56	3,610	3,757
3.	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,27	3,669	3,755
4.	Kesesuaian biaya	3,60	3,669	3,787
5.	Kesesuaian produk	3,54	3,664	3,755
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,59	3,630	3,738
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,66	3,540	3,775
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,47	3,723	3,812
9.	Kualitas isi/konten	3,88	3,620	3,785
	Nilai IKM	89,8	91,12	94,20

Dari nilai IKM yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir, dapat terlihat bahwa nilai IKM secara konsisten terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan terus menerus mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar KIPM Makassar.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2024 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 25 Juli 2024, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" yang diserahkan langsung oleh Sekjen KKP di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1.

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Hingga Triwulan III tahun 2024, anggaran ini belum terealisasi karena masih di blokir oleh Kementerian Keuangan. Pada RKAKL Triwulan IV tahun 2024 ini, terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Jika dilihat dari nilai per unsur dapat terlihat bahwa pada tahun 2024 ini unsur yang sering memiliki nilai paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Pada pelayanan Balai Besar KIPM Makassar digunakan Aplikasi PPK Online dan Sister Karoline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Terkadang aplikasi tersebut mengalami kendala dan memperlambat proses pelayanan. Telah direncanakan akan menggunakan sistem baru sesuai dengan tugas dan fungsi baru BPPMHKP yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu (SIAP Mutu) pada bulan Maret 2025.

Tindakan yang telah dilaksanakan
- Telah dipastikan penggunaan aplikasi Sister Karoline versi 6.002 yang terbaru pada sistem pelayanan untuk mendukung format Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). - Telah dilakukan perpindahan layanan dari kantor pelayanan BKIPM yang telah dialihkan ke Barantin berpindah ke kantor administrasi di kantor induk pada bulan November tahun 2024.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
- Memastikan penggunaan aplikasi terbaru SIAPMutu dalam pelayanan penerbitan SMKHP.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Tahun 2025

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024**



Gambar 1. Infografis Nilai IKM Tahun 2024



Gambar 2. Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2024



DOKUMENTASI PENYERAHAN PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BALLROOM GEDUNG MINA BAHARI III
25 JULI 2024



DOKUMENTASI PERPINDAHAN RUANG PELAYANAN
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN IV TAHUN 2024



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nomor IKU 7	:	Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	83	84	86
Realisasi	82,23	90,27	90,78
% Capaian	99,07	107,46	105,56

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang ASN dengan nilai maksimal bobot 25.

Nilai pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan jenjang jabatan :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	SUD-IV	D-III	D-III-UKLTA/Sekolah	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelembaga	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (Keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (Keahlian)	25	23	20	15	10	5

2. Kompetensi adalah pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek, dan seminar dengan nilai bobot 40.

Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun;

- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe "Diklat Fungsional atau Diklat Teknis" yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP;
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir;

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum, maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5
3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30

Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :

- Nilai 30 (Sangat baik)
- Nilai 25 (Baik)
- Nilai 20 (Butuh perbaikan)
- Nilai 15 (Kurang)
- Nilai 10 (Sangat kurang)

Tabel gambar

Kualitas Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5
- Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplin sebagai berikut :
- Tidak Pernah 5
 - Ringan 3
 - Sedang 2
 - Berat 1

Target Tahunan IP ASN tahun 2024 adalah 86 :

- Semester I : 81
- Semester II : 86

Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3	:	_____	=	0 pegawai x 25	=	0
2. S2	:	- Jabatan Pimpinan Pratama	=	0 pegawai x 23	=	0
	:	- Jabatan Fungsional Keahlian	=	8 pegawai x 23	=	184
						<u>184</u>
3. S1	:	- Jabatan Fungsional Keahlian	=	13 pegawai x 20	=	260
	:	- Jabatan Pengawas	=	1 pegawai x 21	=	21
	:	- Jabatan Pelaksana	=	5 pegawai x 22	=	110
	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	0 pegawai x 22	=	0
						<u>391</u>
4. D3	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	4 pegawai x 21	=	84
	:	- Jabatan Pelaksana	=	1 pegawai x 21	=	21
						<u>105</u>
5. SMA	:	- Jabatan Pelaksana	=	4 pegawai x 20	=	80
	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	1 pegawai x 20	=	20
						<u>100</u>
Jumlah Total						780

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{780}{37} = 21,08$$

Jadi pada tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kualifikasi pendidikan **21,08**.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

-	31 pegawai ASN mendapat nilai 40	=	34 x 40	=	1.360
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 39,25	=	1 x 39,25	=	39,25
-	2 pegawai ASN mendapat nilai 34,75	=	2 x 34,75	=	69,5
	Jumlah			=	1.468,75

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.468,75}{37} = 39,7$$

Jadi pada 2024 diperoleh nilai rata-rata kompetensi ASN sebesar 39,7.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 37 orang ASN memperoleh nilai Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) dengan predikat baik sehingga mendapat bobot nilai 25 = 37 x 25 = 925

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{925}{37} = 25$$

Jadi pada triwulan IV tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kinerja **25**

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjarahan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 37 orang ASN mendapat nilai 5 = $37 \times 5 = 185$

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{185}{37} = 5$$

Jadi pada triwulan IV tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata disiplin **5**.

Dengan demikian, untuk tahun 2024 nilai capaian IP ASN adalah :

1. Kualifikasi pendidikan = 21,08 IP
2. Kompetensi = 39,7 IP
3. Kinerja = 25 IP
4. Disiplin = 5 IP

$$\begin{aligned}\text{Nilai Realisasi IP ASN} &= \text{Kualifikasi Pendidikan} + \text{Kompetensi} + \text{Kinerja} + \text{Disiplin} \\ &= 21,08 + 39,7 + 25 + 5 \\ &= 90,78\end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan nilai IP ASN tahun 2023 yang besarnya 90,27 maka terjadi peningkatan sebesar 0,51.

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 86,07 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 90,78 masih lebih tinggi dengan selisih 4,71.
2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP dengan nilai IP ASN 84,58 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 90,78 masih lebih tinggi dengan selisih 6,2

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> pertanggal 10 Januari 2025

Seluruh pegawai ASN sebanyak 37 orang terlibat dalam pencapaian target indikator ini, yang terdiri dari :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Pjt. Kepala	1
2.	Kepala Subbagian Umum	1
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan/Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	19
5.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1

6.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1
7.	Arsiparis	1
8.	Fungsional Umum	9

SDM pengelola yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 5 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum dan pengelola kepegawaian terdiri dari Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan;

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran semula Rp. 77.285.000,- menjadi Rp.73.833.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	12.000.000	11.000.000
2.	Refreshment panellis organoleptik	3.560.000	3.560.000
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	25.211.000	22.759.000
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.514.000
	Jumlah	77.285.000	73.833.000

Pada tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.833.000,- dapat direalisasikan Rp. 73.434.365,- atau 99,46%, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	11.000.000	10.966.430	99,69
2.	Refreshmen panellis organoleptik	3.560.000	3.450.840	96,93
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	22.759.000	22.749.660	99,95
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.267.435	99,32
	Jumlah	73.833.000	73.434.365	99,46

Jika dibandingkan dengan periode yang sama yakni tahun 2023 yang realisasi anggarannya 99,79% (pagu anggaran Rp. 80.337.000,- realisasi Rp. 80.174.773,-), maka terjadi penurunan sebesar 0,33%.

Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website www.ropeg.kkp.go.id:4080/p-asn

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum dilakukannya update data pegawai untuk pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke BKI Sulawesi Selatan dimana seluruh penilaian kinerja pegawai yang mutasi sudah tidak ternilai lagi di Balai Besar KIPM Makassar;
- Belum adanya pegawai yang memenuhi diklat 20 JP untuk penilaian kompetensi pegawai;
- Potensi masalah menurunnya nilai IP ASN jika terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat pengembangan kompetensi namun tidak segera melakukan penginputan hasil diklat ke dalam akun myASN pegawai yang bersangkutan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Telah dilakukan *update* data pegawai yang mutasi dari Balai Besar KIPM Makassar ke Badan Karantina Indonesia pada aplikasi SIMPEG;
- 2) Menyampaikan kepada pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan/seminar/ webinar, diklat dan pengembangan kompetensi lainnya terutama untuk kegiatan diklat yang memiliki Jam Pembelajaran 20 JP dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;
- 3) Melakukan rekapitulasi sertifikat pelatihan pegawai secara berkala;
- 4) Menyampaikan dan monitoring pegawai untuk melakukan *update* data diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id* minimal sebulan sekali;
- 5) Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*;

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1) Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada <i>myasn.bkn.go.id</i>; 2) Menyampaikan kepada pegawai yang nilai kompetensi belum maksimal untuk mengikuti seminar/latihan untuk pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi <i>myasn.bkn.go.id</i>;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan I Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah Pengunjung	Tanggal	Waktu	Status	Kategori	Waktu	Status	Kategori	Waktu	Status
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Aktivitas Operator Sistem Informasi Kepegawaian



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama IKU B	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	85	85	82
Realisasi	95,3	87,13	83,80
% Capaian	112,12	102,51	102,19

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2020-2024, Renja, RKARL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen Renstra 2020-2024, Renja dan Rencana Aksi yang telah terealisasi Tahun 2024, hingga mencapai 30%.
2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %
Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2024, Aspek ini telah terselesaikan tahun 2024, hingga mencapai 30%
3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %
Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024,
Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan, Aspek ini terselesaikan tahun 2024, hingga mencapai 15 %
4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %
Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPM/KP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari

evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Aspek ini telah diselesaikan, sehingga mencapai 25%.

Dengan demikian realisasi capaian indikator ini tahun 2024 adalah
 Nilai Triwulan I + Nilai triwulan II + Nilai Triwulan III + Nilai Triwulan IV
 $30+30+15+25 = 100\%$

- Adapun Pencapaian Indikator ini tahun 2024 yaitu 83,80 pencapaian ini melebihi dari target 82, Tahunan 2023 melebihi target 85 dari yang ditetapkan dan realisasi mencapai nilai 87,13 jika dibandingkan pada tahun 2022 realisasinya 95,3.
- Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang mengalami beberapa revisi terdiri dari :

Kegiatan	Anggaran			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3987.EBA.958. Layanan Hubungan masyarakat.	Rp 12.470.000	Rp 10.970.000,-	Rp 12.575.000,-	Rp 12.575.000,-
BA.963 Layanan Data dan Informasi	Rp 14.028.000	Rp 14.028.000	Rp 26.093.000,-	Rp 26.093.000,-
Jumlah	Rp 26.498.000,-	Rp 24.998.000,-	Rp 38.668.000,-	Rp 38.668.000,-

- Adapun realisasi sampai pada tahun 2024 sebesar Rp 38.655.199 atau 99,96 %, tahun 2023 anggaran sebesar Rp11.600.000 telah terealisasi sebesar Rp 11.599.584 atau 99,99%, sedangkan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp24.000.000 dengan realisasi Rp23.973.570 atau 99,89%.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Berdasarkan surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan No. B.12/BPPMHKP.1/RC.610//2025 tanggal 2 Januari 2025 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA.2024 UPT Lingkup BPPMHKP dapat dibandingkan Nilai SAKIP Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai 82,80 (Predikat A), Balai KIPM Denpasar dengan Nilai SAKIP dengan nilai 83,10 (Predikat A) sedangkan Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai 83,80 (Predikat A)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Capaian perencanaan belum optimal disebabkan Renja masih dalam proses perbaikan
- Adanya potensi keterlambatan penyelesaian laporan kinerja dari setiap kegiatan untuk triwulan I tahun 2024
- Adanya perubahan target tahunan pada Indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) semula 60 Sertifikat menjadi 23 Sertifikat
- Berdasarkan hasil reviu Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 9-14 Juli 2024 dinyatakan bahwa pada kolom tindakan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan peningkatan kompetensi/sharing session belum dapat menggambarkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut
- Adanya perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dimana ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang berubah yaitu :1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%), 3). Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penanggung jawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan laporan kinerja tahunan 2023 melalui aplikasi ESR Kemenpan RB
- Telah dilakukan dialog kinerja tanggal 2 Februari 2024 dimana salah satu submateri penyampaian materi adalah dokumen penetapan kinerja tahun 2024, selain itu juga dibahas strategi, risiko dan rencana aksi organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja.
- Terselenggaranya Rencana Kerja Tahun 2024
- Telah mengupload data dukung penilaian Mandiri SAKIP pada aplikasi Kinerjaku
- PLT Kepala Balai Besar KIPM Makassar kepada Sekretaris BPPMHKP No. B.1270/B8KIPM.MKS/TU.140/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 Perihal Usulan revisi target kegiatan traceability tahun 2024.
- Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2455/BPPMHKP.1/TU.330/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diadakan di Bandung yang dihadiri oleh Tim Itjen, perwakilan dari Pusat Pengendalian Mutu, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Bandung.
 1. telah melakukan revisi Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Itjen meliputi benchmark Indikator IP ASN, Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar
 2. Melengkapi informasi pada LKJ, terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan informasi keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja beserta upaya nyata perbaikannya
 3. Telah Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU pada indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan/atau pengolahan ikan menerapkan sistem traceability
- Telah terselesainya laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024
- Telah Melakukan sosialisasi Hasil review Itjen KKP yang terkait perlunya output kegiatan yang tercantum pada laporan kinerja pada rapat evaluasi dan capaian kinerja III pada tanggal 8 – 10 Oktober 2024.
- Telah dilaksanakan rapat pembahasan realisasi anggaran dan Perjanjian Kinerja. Perubahan pada tanggal 11 Oktober 2024. Point point rapat pembahasan tersebut antara lain : a). Tindak Lanjut arahan dari Sekretaris BPPMHKP terkait langkah langkah menghadapi akhir tahun anggaran, b). masih relative banyaknya anggaran yang belum terserap di triwulan IV sehingga perlu percepatan realisasi anggaran, c). adanya PK perubahan di Triwulan IV pada produksi primer dan pasca panen menyebabkan penyesuaian kembali kegiatan pada triwulan IV, d). Penambahan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer dan pasca panen sehingga mengharuskan adanya koordinasi dengan instansi terkait (DKP Provinsi/Kab/Kota/Eselon I terkait.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan penyampaian laporan Kinerja Triwulan IV dan LKJ Tahunan pada aplikasi E-SAKIP Review tepat waktu	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan I Tahun 2025



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUNAN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Nama IKU 9 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun		
	2022	2023	2024
Target	81	82	71
Realisasi	87,87	86,20	98,37
% Capaian	108,48	105,12	138,54

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard Kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada Tahun 2024 target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar terjadi perubahan dari target 82 nilai menjadi 71 nilai.

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat perubahan pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nilai Kinerja (%)				Ket.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	0	11,92	27,46	49,79	
2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0	35,54	48,78	48,58	

Tabel Total Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 sebagaimana pada tabel :

No	Uraian Kegiatan	(%)				Ket.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Total Nilai Kinerja Anggaran	20,75	47,46	74,24	98,37	
2	Nilai	-	Sangat Kurang	Cukup	Sangat Baik	

Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Tahun 2024 adalah " Sangat Baik " artinya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Sangat Baik, dan perlu dipertahankan Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

1. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran : Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RD) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Dibawah ini adalah Dashboard aplikasi yang menampilkan Nilai kinerja Perencanaan Anggaran.
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : Pengukuran Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran di dukung oleh Indikator yaitu: Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian output dan Dispensasi SPM

Berikut adalah Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai dan nilai akhir Tahun 2024 masing-masing indikator:

1. TW 1 : Penyerapan (nilai = 30 dan Nilai Akhir = 2,91), Konsistensi (nilai = 96 dan Nilai Akhir = 17,84), Capaian Realisasi Output (nilai = 0 dan Nilai Akhir =0) dan Efisiensi (nilai = 0 dan Nilai Akhir =0)
2. TW 2 : Revisi DIPA (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), Deviasi Hal 3 DIPA (nilai = 13,24 dan Nilai Akhir = 15), Penyerapan Anggaran (nilai = 17,78 dan Nilai Akhir = 18,93), Belanja Kontraktual (nilai = 10 dan

Nilai Akhir = 10), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 10 dan Nilai Akhir = 10), **Capaian Output** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 25), **Dispensasi SPM** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0)

3. TW 3 : **Revisi DIPA** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Deviasi Hal 3 DIPA** (nilai = 90,78 dan Nilai Akhir = 15), **Penyerapan Anggaran** (nilai = 94,67 dan Nilai Akhir = 20), **Belanja Kontraktual** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Capaian Output** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25);
4. TW IV : **Revisi DIPA** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Deviasi Hal 3 DIPA** (nilai = 92,15 dan Nilai Akhir = 13,82), **Penyerapan Anggaran** (nilai = 96 dan Nilai Akhir = 19,2), **Belanja Kontraktual** (nilai = 92 dan Nilai Akhir = 9,2), **Penyelesaian Tagihan** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), **Pengelolaan UP dan TUP** (nilai = 99,34 dan Nilai Akhir = 9,93), **Capaian Output** (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25) dan **Dispensasi SPM** (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0)

Aplikasi Monev Kemenkeu tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya perbedaan indikator pengukuran untuk mendapatkan nilai Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023 adalah 98,37 % dan 86,20 %, terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar 12,17 %.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar TW1 dan TW2 sebesar Rp 71.621.000, dengan realisasi pada TW1 sebesar Rp 52.691.384 atau 73,57%, realisasi pada TW2 sebesar Rp. Rp62.710.204 atau 87,56%, realisasi pada TW3 sebesar Rp. 74.642.304 atau 93,12% dan TW 4 adanya revisi penambahan pagu sehingga menjadi Rp 80.159.000. Adapun realisasi Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 79.998.804 atau 99,80 % yang digunakan untuk:

- TW 1 : Rapat kerja teknis BKIPM dan Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan;
- TW 2 : Belanja bahan dan Belanja perjalanan dinas biasa;
- TW 3 : Belanja ATK dan Belanja perjalanan dinas biasa;
- TW 4 : Belanja ATK dan Belanja perjalanan dinas biasa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 pagu sebesar Rp. 45.626.00 dengan realisasi anggaran 45.623.975 atau 99,99 % sedangkan pada tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 99.022.000 dengan realisasi anggaran 2023 adalah Rp. 98.502.467 atau 99,48 % terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran sebesar 0,32 %. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2024.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IKU ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

TW 1 : Potensi masalah yang terjadi karena blm adanya himbauan dari kementerian keuangan untuk melakukan penginputan capaian-output yang merupakan salah satu variabel dalam perhitungan NKA(Aplikasi belum siap) sehingga perhitungan NKA pada satker Balai Besar KIPM Makassar masih dalam proses;

TW 2 : Operator belum memahami proses bisnis dari Aplikasi Monev Keuangan sehingga belum bisa mengetahui perhitungan setiap komponen atau indikator dari pengukuran Nilai Kinerja Anggaran;

TW 3 : Penyerapan anggaran di TW III belum mencapai target 75%. Realisasi di TW III 2024 baru mencapai 64%.

TW 4 : Kurang optimalnya staff KPA dan Staff PPK dalam memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024 sehingga penyerapan anggaran tidak optimal

Tindakan yang telah dilaksanakan

- TW 1 : Menindaklanjuti rekomendasi triwulan IV 2023 operator smart dja telah melakukan komunikasi dengan petugas KPPN Makassar II terkait pelatihan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI namun pada triwulan I 2024 baru dapat dilaksanakan pelatihan implementasi aplikasi MonSAKTI (BMN, Persediaan, dan GLP)
- TW 2 : - Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2024 pada tgl 3 April 2024;
- Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 di Wilayah KPPN Makassar II
- TW 3 : Operator telah melakukan konsultasi terkait proses bisnis Money Kementerian Keuangan pada layanan SAPA ANGGARAN.
- TW 4 : Telah dilaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW 4 Tahun 2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. Adapun poin-poin rapat tersebut antara lain :
- Tindaklanjuti arahan dari Sekretaris BPPMHKP terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran;
 - Masih relatif banyaknya anggaran yang belum terserap di triwulan 4 sehingga perlu percepatan realisasi anggaran

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
- Mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025; - Menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan I Tahun 2025

Dokumentasi rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW IV 2024 pada tanggal 11 Oktober 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Nama IKU 10 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BBKIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	89	93,75	93,76
Realisasi	96,44	96,38	97,16
%Capaian	108,36	102,81	103,63

Catatan 1:

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup :

1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper;
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 - a. Capaian output (25%)

Capaian nilai IKPA pada tahun 2024 sebesar 97,16 dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran

- a. Revisi DiPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DiPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester. Pada tahun 2024 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah : $(100/100) \times 10\% = 10\%$
- b. Deviasi Halaman III DiPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DiPA. Deviasi Halaman III DiPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DiPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN sampai Desember 2024 sebesar 92,15 sehingga nilai deviasi halaman III DiPA sebagai berikut :

Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DiPA adalah $(92,15/100) \times 15\% = 13,82\%$.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi Monev PA 95,77 maka diperoleh bobot sebagai berikut :

$$95,77 \times 20\% = 19,15\%$$

Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker, dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja (1) Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%), (2) Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%), dan (3) Komponen akselerasi kontrak (bobot 20%).

Sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat kontrak dini, belanja modal dan akselerasi kontrak, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

- Akselerasi kontrak dini	: 1 x 40% =	40
- Akselerasi belanja modal	: 1 x 40% =	40
- Akselerasi kontrak	: 1 x 20% =	20
Jumlah		= 100

Dengan demikian capaian indikator kinerja belanja kontraktual adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

- b. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra. Pada tahun 2024 seluruh SPM-LS kontraktual telah disampaikan tepat waktu sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$100 \times 10\% = 10;$$

- c. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP kartu kredit pemerintah, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) Pengelolaan UP dan TUP tunai (bobot 90%), dan (2) Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah (bobot 10%). Untuk pengelolaan UP dan TUP tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari (1) Ketepatan waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP (bobot 25%), dan (3) Setoran TUP (bobot 25%).

Pada tahun 2024 pengelolaan UP dan TUP dihitung sebagai berikut :

(1) Perhitungan nilai pengelolaan UP dan TUP tunai :

- Ketepatan waktu	: 100 x 50%	= 50
- Persentase GUP	: 100 x 25%	= 25
- Setoran TUP	: 100 x 25%	= 25
Jumlah		= 100

Jadi nilai UP dan TUP tunai adalah : $(100/100) \times 90\% = 90$

(2) Perhitungan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah :

Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga nilainya adalah 100.

Jadi nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

Dengan demikian nilai kinerja pengelolaan UP dan TUP adalah : $(90 + 10)/100 \times 10\% = 10\%$.

- d. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di tahun 2024.

Pada tahun 2024 tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan tahun 2024, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu	$100 \times 30\%$	= 30
- Capaian RO	$100 \times 70\%$	= 70
	Jumlah	= 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah $(100/100) \times 25\% = 25\%$.

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	92,15	96	92	100	99,34	0	100	97,16
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25	
Nilai Akhir	10	13,92	19,15	92	10	9,93	0	25	
Nilai Aspek	96,08		96,64					100	

Dibandingkan dengan realisasi IKPA pada tahun 2024 sebesar 97,16, realisasi IKPA tahun 2023 sebesar 96,28 dan realisasi IKPA tahun 2022 sebesar 96,44, capaian IKPA Balai Besar KIPM Makassar berada dalam kategori sangat baik dengan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, hal ini menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar sudah memadai.

Tahun 2024 seluruh Satker lingkup KKP mengampu indikator kinerja di atas termasuk unit kerja eselon I lain di KKP, seperti Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang memiliki eselon setara dengan Balai Besar KIPM Makassar. Capaian IKPA unit kerja tersebut adalah 99,29 lebih besar dari capaian Balai Besar KIPM Makassar sebesar 97,16. Selain itu, terdapat juga unit kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari yang memiliki capaian kinerja IKPA sebesar 96,19 lebih kecil dari capaian Balai Besar KIPM Makassar sebesar 97,16.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 setelah revisi sebesar Rp. 9.468.000, telah direalisasikan Rp. 9.440.000,- atau 99,70% yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan supplies komputer, perjalanan pembinaan keuangan, dan perjalanan konsultasi perpajakan;

Jika dibandingkan pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- dengan realisasi Rp. 13.168.000,- atau 99,76%.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Capaian Output pada aplikasi SAKTI belum dapat diinput disebabkan aplikasinya sedang dalam tahap pengembangan pada menu capaian output;
2. Potensi masalah yang mungkin bisa terjadi adalah turunnya nilai IKPA apabila operator kurang memonitoring pelaksanaan anggaran;
3. Terjadinya penurunan nilai IKPA triwulan III 2024 sebesar 1,39% dari triwulan II 2024;
4. Terjadinya penurunan di pelaksanaan anggaran belanja kontraktual dilakukan pada akhir tahun anggaran karena belanja modal yang diadakan merupakan produk impor sehingga memerlukan persetujuan dari Biro Umum dan PBJ Sekjen KKP. Persetujuan pengadaan barang produk impor diperoleh pada tanggal 13 November 2024 sesuai Surat Sekjen KKP No : B.1331/SJ/PL.420/XI/2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pada tanggal 26 Januari 2024 dilaksanakan briefing pagi yang salah satu substansi penyampaiannya adalah operasional capaian IKPA;



2. Telah melakukan komunikasi dengan KPPN Mitra dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI pada tanggal 22 April 2024 sekaligus mengikuti sosialisasi pengisian capaian output. Hasil dari komunikasi itu adalah telah terealisasinya capaian output Triwulan I tahun 2024 dengan nilai sempurna atau 100



3. Mengikuti Treasury Award KPPN Makassar II semester I 2024 pada tanggal 25 september 2024.



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 11	:	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	≤1	100	100
Realisasi	0	100	100
% Capaian	100	100	100

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Setker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2023;

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 pada Balai Besar KIPM Makassar oleh BPK RI. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan temuan sebagai berikut :

No.	Uraian Temuan	Nilai (Rp.)
1	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	6.770.700
2	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu	5.280.000
3	Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum	5.040.000
	Jumlah	17.090.700

Sesuai surat Sekretaris BPPMHPK Nomor B.1245/BKIPM.1/HP.520/IV/2024 tanggal 2 April 2024 Hal Tanggapan Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI, maka telah dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI tersebut, yakni dengan melakukan penyatoran atas kelebihan pembayaran dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian Penyetoran	Nomor dan Tanggal NTPN
1.	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 6.770.700,-	No. 100F61QV3RROBMS Tanggal 23 April 2024
2.	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional tertentu sebesar Rp. 5.280.000,-	No. C1C023CIFK4LPCAN Tanggal 23 April 2024
3.	Penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 5.040.000,-	No. 9871D2G4VP19CBJ2 Tanggal 23 April 2024

Dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah :

$$\begin{aligned} \% P &= (A/B) \times 100\% \\ &= (17.090.700/17.090.700) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada tahun 2024, untuk mendukung kegiatan dialokasikan anggaran semula Rp. 11.644.000,- yang direvisi menjadi Rp. 4.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	8.044.000	1.042.000
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer supplies	3.600.000	3.228.000
	Jumlah	11.644.000	4.270.000

Pada tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.270.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.262.500,- atau 99,82% yang digunakan untuk penjilidan dan penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer supplies Rp. 3.220.500,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	1.042.000	1.042.000	0,00
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer supplies	3.228.000	3.220.500	99,77
	Jumlah	4.270.000	4.262.500	99,82

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 16.400.000,- yang direvisi menjadi Rp. 11.600.000,- dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp. 11.599.584,- atau 99,99%. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi sebesar 0,17% pada periode yang sama tahun 2024;

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Perbedaan pemahaman dalam implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pembayaran adalah telah dilakukan pengecekan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah di-PDF-kan secara berkala;
- Meningkatkan pemahaman dan kecermatan verifikator keuangan dan pengelola anggaran melalui sharing session "Penatausahaan Tagihan Pembayaran Belanja" dengan nara sumber PPK dan Kepala Subbagian Umum pada tanggal 3 Mei 2024;
- Melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen tagihan pembayaran belanja oleh verifikator keuangan;
- Melakukan verifikasi secara berjenjang pada dokumen tagihan pembayaran belanja mulai dari PPABP, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM;
- Telah direalisasikan anggaran kegiatan pemantauan dan evaluasi sebesar 99,82% sampai dengan triwulan III tahun 2024;
- Mengikutkan pegawai pengelola anggaran pada pelatihan peningkatan kompetensi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
- Internalisasi Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN di Lingkungan KKP	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan I Tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan :



Gambar 1. Verifikasi Bukti Tagihan Belanja Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024



Gambar 2. Briefing Kepada Pengelola Anggaran



Gambar 3. Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.



Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2024 Lingkup KKP (Virtual Meeting)



Gambar 5. Koordinasi dan Mitigasi Batasan Waktu Penyampaian Data Kontrak dan SPM (Virtual Meeting)



Gambar 4. Internalisasi Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN di Lingkungan KKP Lingkup Dukungan Manajerial

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama IKU 12	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2022	2023	2024
Target	70	75	80
Realisasi	100	100	100
% Capaian	142,86	133,33	125

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{JNR}{JN} \times 100\%$$

JNR = Jumlah rekomendasi dari UPT Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

JN = Jumlah rekomendasi dari UPT Inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan;

Pada tahun 2024 terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP yang memberikan 4 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti 100%, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode tahun 2023 realisasi sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran Rp.822.011.000,- yang sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.709.408.509,- atau 86,30% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran,

belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 11.600.000,- dan sampai akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 11.599.584,- atau sebesar 99,99%, adapun pada tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.748.570,- atau sebesar 98,95%

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.600.000,- terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 6986,30%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini, yang semula hanya berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, menjadi belanja operasional perkantoran.

Adapun realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 dari pagu Rp. 11.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.599.584,- atau 100%, secara persentase lebih besar 23,70% dari realisasi tahun 2024.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan sdm dalam mendukung iku ini.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi PNBP oleh itjen KKP berupa :
 - Surat Instruksi PIt. Kepala Balai PPMH KP Makassar Nomor 080/BBKIPM.MKS/TU.330/XI/ 2024 tanggal 12 November 2024 perihal Instruksi Pengambilan Sampel Organoleptik kepada Petugas yang bertugas melakukan pengambilan Sampel Organoleptik
 - Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada BPPMHKP Dengan Nara Sumber dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada Tanggal 28 November 2024
 - Memorandum PIt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor 081/BBKIPM.MKS/TU.210/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 Hal Penyelesaian Tindakan Perbaikan Evaluasi PNBP
 - Reviu terhadap SOP Pelayanan Balai Besar PPMH KP Makassar sesuai dengan Notulensi HASIL REVIEW SOP SERTIFIKASI EKSPOR DAN LAYANAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN tanggal 27 November 2024
- Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Audit.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan I tahun 2025

Tampilan layar pada aplikasi SiDAK
<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik lingkup UPT BBKIPM Makassar
Nama IKU 13	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Target	75	77,50	80,00
Realisasi	100	78,26	84,34
% Capaian	133,33	100,98	105,43

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.

Perlu kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksanaanya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)
3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur sebagai berikut :

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 707.018.000,
- b. Paket Pengelola sebanyak 30 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.021.375.000,
- c. Paket Penyedia dalam pengelola sebanyak 68 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 462.89.000,

Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP telah terealisasi ~ 20%,

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Sarana Pengujian Mutu senilai Rp. 691.334.000,- dan telah dilaksanakan pengadaannya melalui e-katalog dengan rincian barang sebagai berikut :

- a. Nitrogen Evaporator
- b. Irrigation Bottle
- c. Analytical Balance (Timbangan Analitik)
- d. Biological Safety Cabinet
- e. Dry Oven
- f. Autoclave
- g. Micropipette
- h. Hot Plate Stirrer
- i. Desicator
- j. Alat Pengolah Data

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini terealisasi 30%.

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah dilakukan pencatatan dan penginputan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pelaksanaan penginputan dilakukan secara berjenjang dari Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP.

Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (20 %)

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Progres pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2024 menggunakan :

1. System Digipay - Marketplace yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-20/PB.2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, dan secara teknis diatur dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022.
2. E-katalog yang merupakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 122 Tahun 2022.

Seluruh pengadaan diatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 30%.

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini tahun 2024 adalah :

Unsur 1 (20%) + Unsur 2 (30%) + Unsur 3 (20%) + Unsur 4 (30%) = 100 % dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(100\%/80\%) \times 100\% = 125 \%$

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 nilai realisasinya 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 78,26%. Hal ini disebabkan perubahan komponen yang dinilai dan pembobotan untuk mengukur tingkat

kepatuhan PBJ Tahun 2024. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan nilai beberapa unsur yaitu :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)
1.	Persentase RUP telah diupload kedalam Aplikasi SIRUP	20
2.	Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE	30
3.	Persentase laporan penyelenggaraan PBJ	20
4.	Kesesuaian tahap pelaksanaan	30
JUMLAH		100

Adapun pada tahun 2024 komponen penilaian tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan nilai beberapa unsur yaitu :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Ketersediaan manajemen resiko PBJ strategis BPPMHKP	10	10,00
2.	Perencanaan dan persiapan pengadaan	15	13,75
3.	Persentase pemilihan PBJ yang dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	10	10,00
4.	Kesesuaian tahap pelaksanaan	45	31,83
5.	Laporan penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ Lingkup BPPMHKP pada TW I/s/d TW III tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

Berdasarkan evaluasi Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor surat B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dengan nilai 84,34%.

Realisasi anggaran mendukung kegiatan tahun 2022 sebesar Rp.488.710.000,- atau 95,56% sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp.57.803.250,- atau 99,66% dan anggaran untuk mendukung kegiatan tahun 2024 Rp.312.298.000,- dengan realisasi sebesar Rp.306.109.981,- atau 98,2%.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 9 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

TW 1.

- Potensi keterlambatan Pengadaan ATK dan Komputer Suplies melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena ketersediaan barang dibutuhkan pada e-katalog terbatas.
- Penyerapan anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan Pengadaan makanan/ minuman Penambah Daya Tahan Tubuh relatif rendah karena pegawai yang berhak menerima fasilitas pas pelabuhan laut/ udara dan makan/ minuman penambah daya tahan tubuh jumlahnya berkurang

TW 2.

Tingkat penyerapan anggaran masih sangat rendah yaitu pada kegiatan :

- Pengadaan penambah daya tahan tubuh sampai dengan Triwulan II/sampai dengan bulan juni 2024 senilai Rp. 4.294.900,00 atau senilai 21,41% dari anggarannya sebesar Rp.20.064.000,-
- Operasional Pas pelabuhan Laut/Bandara sampai dengan Triwulan II/sampai dengan bulan juni 2024 senilai Rp. 3.050.000,00 atau senilai 16,76% dari anggarannya sebesar Rp.15.150.000,-

TW 3.

Lambatnya progres penyerapan anggaran pada akun belanja modal peralatan laboratorium karena menunggu persetujuan sehubungan dengan tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan;

Terlambatnya persetujuan tentang persyaratan pembelian barang, yang mengakibatkan keterlambatan modal

TW 4.

Beberapa kegiatan yang direvisi (penambahan anggaran) pada triwulan IV banyak yang tidak terealisasi karena waktu pelaksanaan yang tidak memadai

Tindakan yang telah dilaksanakan

TW 1.

1. Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara operator komitmen dan operator persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan ke dalam aplikasi SAKTI
2. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa telah memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang/ jasa

TW 2.

1. Pada hari Rabu, 22 Mei 2024 bertempat di kantor Balai Besar KIPM Makassar Jl. Dakota No. 24, Sudiang – Makassar, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak PT. Duta Artha Perdana selaku pihak penyedia terkait penyediaan dan percepatan pengadaan barang dalam SPSE berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies.
2. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen telah mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) anggaran pengadaan pas pelabuhan laut/ udara dan anggaran Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pada triwulan II telah dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

TW 3.

1. Telah melakukan revisi anggaran untuk kegiatan penambah daya tahan tubuh dan operasional pas pelabuhan/udara.
2. Pjt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar telah bersurat ke Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2345/BBKIPM.MKS/PL.410/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk barang yang nilai TKDNnya kurang dari 25% dan Produk Impor.
3. Pada triwulan III telah dilaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Pengelola Barang/Jasa tanggal 17 September 2024 atas nama Abdul Mubarak Azis dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kompetensi LKPP Nomor: 08-00628-0924.

TW 4.

1. PPK dan PP telah menyiapkan langkah strategis pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yang Tingkat Komponen Dalam Negerinya tidak mencapai 25 %;
2. Telah melaksanakan revisi RKAKL disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Telah mengupdate SIRUP sesuai revisi RKAKL yang telah disahkan.
4. Telah menyusun dokumen pengadaan barang/jasa sesuai regulasi yang berlaku.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa agar memperhatikan rekam jejak/ pengalaman kerja calon penyedia barang. 2. Mempelajari dan mengikuti ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Tahun 2025

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2023**

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik lingkup UPT BBKIPM Makassar

Nama IKU 14 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun		
	2022	2023	2024
Target	75	77,5	80,00
Realisasi	100	99,83	97,50
%Capaian	133,3	128,81	121,88

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengelolaan BMN dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan BMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013.

Evaluasi pengelolaan BMN di KKP memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- **Meningkatkan Akuntabilitas** untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah setiap tahap pengelolaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Optimalisasi Penggunaan Aset** untuk mengidentifikasi potensi penggunaan BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat membantu kementerian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi** untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan**: Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%).
Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2023 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:

- Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.
- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.259.209.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.539.256.000,-.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.335.527.000,-.

Nilai tersebut sudah merupakan revisi penambahan anggaran belanja operasional sebesar Rp.409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 %

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar mempunyai Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Belanja Modal tersebut telah dilaksanakan 100% secara fisik pada triwulan IV, hanya saja belum dilakukan usulan penetapan statusnya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berakhir dibulan Desember 2024.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 25%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Tahun 2024 (bobot 25%).

Usulan penghapusan barang milik negara pada Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1172/KEPMEN-KP/PL.750/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Usulan penghapusan ini merupakan barang milik negara yang telah diserahkan ke Badan Karantina Indonesia.

Dengan demikian, IKU ini terealisasi sebesar 25%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

Pada Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah selesai melaksanakan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.659.238.038 dari pagu anggaran senilai Rp. 691.334.000,-. Dari hasil pengadaan tersebut penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian telah dilaksanakan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini realisasinya 25%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Pada Tahun 2024 operator modul persediaan telah menginput seluruh transaksi belanja barang persediaan dan telah di kompilasi dengan modul aset tetap sehingga terbentuk satu neraca aset lancar dan aset tetap tingkat satuan kerja. Untuk penyusunan/penyampaian laporan BMN tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2024 unaudited akan dilaksanakan pada Januari 2025 Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini realisasinya 12,5%

Realisasi Indikator Kinerja ini tahun 2024 adalah :

Unsur 1 (12,5%) + Unsur 2 (25%) + Unsur 3 (25%) + Unsur 4 (25%) + Unsur 5 (12,5%) = 100 % dari target 80%.

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(100\%/80\%) \times 100\% = 125\%$.

Berdasarkan evaluasi Sekretariat BPPMHK nomor B.67/BPPMHK/1/PL.760/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHK Tahun 2024 tingkat kepatuhannya 97,50%

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 11.266.994.000,- (sebelas milyar dua ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	8.182.000	8.172.000	10.000	99,88
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.875.000	12.838.000	19.000	99,83
3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	21.738.000	21.748.880	9.340	99,96
4	Layanan Umum	15.545.000	15.545.760	101.340	99,99
5	Layanan dan Informasi	26.088.000	26.089.199	3.801	99,99
6	Layanan Pemantauan	11.081.328.000	10.826.888.935	224.442.075	97,97
7	Layanan Manajemen SDM	38.314.000	38.267.433	246.565	99,81
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	90.188.000	79.888.334	180.186	99,80
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.270.000	4.262.900	7.500	99,81
10	Layanan Manajemen Keuangan	8.488.000	8.440.000	38.000	99,70
TOTAL		11.266.994.000	11.041.966.283	225.027.717	98,00

Adapun pagu anggaran untuk mendukung kegiatan di tahun 2022 sebesar Rp.32.979.000,- dengan realisasi sebesar Rp.32.951.400,- atau 99,91%. Untuk tahun 2023 pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.29.379.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.809.500,- atau 98,06%. Sedangkan pada tahun 2024 pagu anggaran Rp.11.266.994.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.041.966.283 atau 98,00%.

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 9 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Madya/Pejabat Pembuat Komitmen
4. Pejabat Pengadaan,
5. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,

6. Operator SAKTI Modul Persediaan,
7. Operator SAKTI Modul GLP,
8. Pengelola BMN,
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

TW I

Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana tidak memahami uraian tugas sebagai tanggung jawabnya, sehingga saat ini tugas hanya dilaksanakan oleh Analis Laporan BMN.

TW II

Sebanyak 5 unit kendaraan dinas (kendaraan roda 2) tidak pernah mengajukan penggantian eksploitasi bahan bakar secara berkala, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran dan tidak meratanya nilai pemakaian bahan bakar setiap kendaraan. Ini di karenakan odometer kendaraan tersebut sudah tidak berfungsi.

TW III

1. Sebanyak 3 unit kendaraan roda 2 belum perpanjangan STNK.
2. Belum terlaksananya kegiatan Belanja Modal senilai Rp. 691.334.000,-
3. Masih ada anggaran Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan) senilai Rp.4.700.000,- yang terdiri dari Pas Kendaraan Rp.1.400.000,- dan Pas Orang Rp.3.300.000,-
4. Kurang diberdayakannya Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

TW IV

Masih banyaknya anggaran yang tidak terealisasi pada kegiatan :

1. Pemeliharaan/maintenance alat laboratorium senilai Rp.36.660.990,-
2. Pemeliharaan jaringan senilai Rp.17.943.906,-
3. Tambah daya listrik Rp.66.000.000,-

Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi perencanaan anggaran kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

TW I

1. Operator modul komitmen telah melaksanakan penginputan/pendetailan barang persediaan sesuai ketentuan.
2. Pemeliharaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan meliputi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.

TW II

1. Telah melaksanakan pendampingan dalam pengelola BMN dan Pengadministrasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Telah melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan halaman, pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 serta peralatan dan mesin lainnya.

TW III

1. Telah melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2, hanya saja beberapa kendaraan tidak sampai pada perbaikan odometer sehingga belum mengajukan eksploitasi bahan bakar secara berkala. Perbaikan odometer sebanyak 2 unit kendaraan belum terealisasi karena penanggungjawab kendaraan belum menyerahkan kendaaraannya ke bagian pemeliharaan.
2. Telah mengupdate penanggungjawab kendaraan dinas sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Pjt Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.24/88KIPM.MKS/KKP.440/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. (terlampir).
3. Mengikuti FGD Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal KKP secara luring dan daring pada tanggal 29 Juli 2024.
4. Mengikuti kegiatan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 yang di laksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP tanggal 17 – 20 September 2024 di Bandung secara daring.

TW IV

1. Telah melaksanakan Perpanjangan STNK 3 unit kendaraan roda 2.
2. PPK dan Pejabat Pengadaan telah melaksanakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Telah melaksanakan revisi anggaran pas bandara.
4. Telah memberdayakan pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Operator Komitmen dan Operator Persediaan sebelum melakukan penginputan belanja barang persediaan kedalam aplikasi SAKTI. - Menugaskan 1 (satu) orang staf sebagai operator Modul Aset Tetap dan 1 (satu) orang staf sebagai operator Modul Persediaan. - Melaksanakan penghapusan barang milik negara yang kondisinya rusak berat. - Melaksanakan pemusnahan sertifikat karantina ikan dan mutu yang sudah tidak berlaku/usang.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Tahun 2025

Lampiran







